

BAB I

PENDAHULUAN

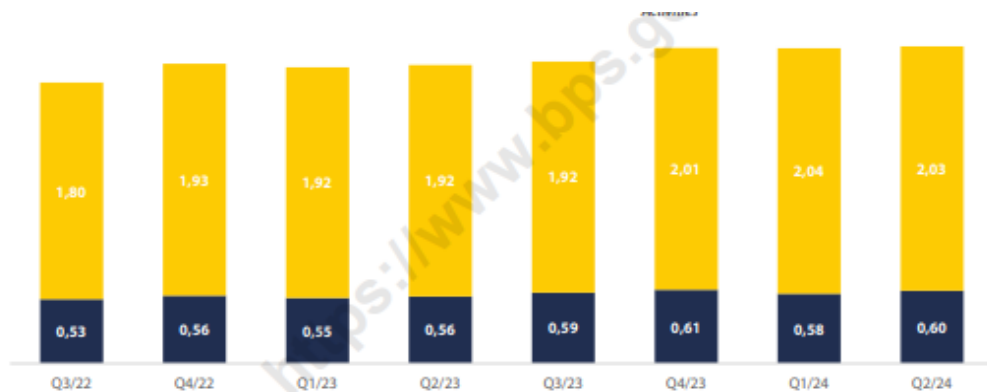
1.1 Latar Belakang

Sektor pariwisata merupakan salah satu industri yang dapat memberikan devisa bagi suatu negara, termasuk Indonesia yang memiliki potensi besar di bidang ini, sehingga memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan suatu wilayah. Sektor pariwisata merupakan komponen penting dalam meningkatkan pendapatan lokal dan devisa negara, serta berperan signifikan dalam memperkuat dan mendorong pembangunan nasional (Wibowo dkk., dalam Qamaruddin & Rajiman, 2023). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, yang menyatakan bahwa pariwisata berperan dalam meningkatkan pendapatan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan mengatasi pengangguran.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia mengungkapkan beberapa indikator kinerja pariwisata mencatat tren positif selama tahun 2024. Salah satunya adalah kontribusi sektor ini terhadap PDB yang mencapai 4,01% pada semester I 2024, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 3,9% (kemenparekraf.go.id, 2024). Di samping kedatangan wisatawan asing, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa hingga Oktober 2024, terdapat 11,6 juta wisatawan asing, dan diperkirakan angka ini akan terus meningkat hingga Desember 2024.

Salah satu subsektor pariwisata yang berkontribusi terhadap perekonomian di Indonesia adalah di bidang kuliner. Pariwisata dan kuliner

memiliki keterkaitan yang cukup erat dimana dalam pariwisata, kuliner khususnya kuliner lokal suatu daerah akan mendukung kegiatan promosi wisata. Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, sektor kuliner negara ini memiliki potensi yang sangat besar untuk konsumsi domestik maupun internasional. Sektor kuliner menyumbang 34% dari PDB pada tahun 2023, menurut Badan Pusat Statistik (BPS).



Gambar 1.1 Kontribusi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dalam PDB (persen), 2022–2024

Sumber: *Badan Pusat Statistik*

Sejalan dengan data tersebut, terdapat keterkaitan antara promosi pariwisata daerah dengan kuliner lokal yang ada di tempat tersebut, maka budaya gastronomi suatu daerah merupakan salah satu daya tarik pariwisata yang diperkenalkan oleh pemerintah. Wisata gastronomi menurut Sufa, dkk. (2024) merupakan perjalanan yang memberikan pengalaman menikmati makanan sebagai tujuan utama sambil mempelajari proses produksinya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gastronomi adalah seni menyiapkan hidangan yang lezat atau tata boga. Menurut (Widyawan dkk, 2024) pengembangan potensi wisata gastronomi perlu untuk sebagai pelengkap

atraksi dan meningkatkan pengalaman wisatawan. Hal ini dikarenakan seorang wisatawan berdasarkan motivasinya untuk mengunjungi suatu destinasi wisata dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu *gastronomic tourism*, *culinary tourism*, dan *rural/urban tourism*. Dalam *gastronomic tourism*, motivasi wisatawan untuk berkunjung adalah karena makanan atau minuman tertentu di wilayah tertentu.

Salah satu daerah yang memiliki potensi wisata di bidang kuliner lokal atau gastronomi adalah Kota Salatiga yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Menurut data BPS terlihat dalam Produk Domestik Regional Bruto Salatiga Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum merupakan penyumbang terbesar keempat bagi perekonomian di Salatiga.

Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Kota Salatiga Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), 2020–2024

Kategori	Uraian	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	602,19	631,75	683,27	727,26	791,94
B	Pertambangan dan Penggalian	5,44	5,34	4,95	5,16	3,82
C	Industri Pengolahan	4.272,67	4.589,25	5.042,79	5.541,59	5.992,10
D	Pengadaan Listrik dan Gas	24,71	25,76	27,66	28,74	30,57
E	Pengadaan Air, pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,06	9,31	9,85	10,32	11,15
F	Konstruksi	1.850,35	1.929,82	2.086,17	2.282,64	2.456,46
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	1.704,86	1.823,95	1.973,25	2.136,25	2.285,99
H	Transportasi dan Pergudangan	304,90	324,56	517,84	600,04	649,49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	944,91	1.002,97	1.168,33	1.316,54	1.431,13
J	Informasi dan Komunikasi	510,45	542,72	555,04	593,00	649,02
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	471,77	498,68	543,54	574,10	593,65
L	Real Estate	612,78	631,73	675,21	725,01	755,84
M,N	Jasa Perusahaan	167,00	174,33	192,12	210,37	232,41
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	690,22	705,65	741,13	777,72	853,08
P	Jasa Pendidikan	733,79	741,66	757,51	806,63	871,84
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	239,51	242,33	254,17	273,46	295,90
R,S,T,U	Jasa lainnya	127,24	129,09	148,68	161,50	174,86

Sumber: BPS Kota Salatiga

Pada tahun 2024, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 1.431,13 miliar rupiah. Kontribusi kategori ini mengalami peningkatan dari 7,12 persen pada 2020 menjadi 7,92 persen pada tahun 2024. Selain kontribusinya mengalami peningkatan, pertumbuhan kategori ini juga mengalami peningkatan cukup tinggi sebesar 11,43 persen pada tahun 2023. Namun di tahun 2024 mengalami perlambatan menjadi 6,45 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Salatiga memiliki potensi yang besar di bidang pariwisata dan menandakan peran penting pariwisata dalam perekonomian lokal.



Gambar 1.2 Kota Salatiga Masuk Nominasi UCCN 2023

Sumber: *jatengprov.go.id*

Kota Salatiga pernah diusulkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, untuk masuk ke dalam nominasi Kota Gastronomi pada ajang UNESCO Creative Cities Network (UCCN) pada tahun 2021 dan tahun 2023. Creative City of Gastronomy UNESCO adalah bagian dari UNESCO Creative Cities Network (UCCN), sebuah program yang diluncurkan pada tahun 2004 untuk mempromosikan kerjasama antar kota di seluruh dunia yang

menjadikan kreativitas sebagai faktor strategis dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Jaringan ini mencakup tujuh bidang kreatif, termasuk Gastronomi, di samping Seni Kerajinan, Desain, Film, Sastra, Seni Media, dan Musik (unesco.org).

Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) dalam upaya untuk mendorong pertumbuhan sektor kreatif, mengakui kota-kota kreatif di seluruh dunia pada tahun 2001 berdasarkan standar tertentu. Kota-kota kreatif merupakan salah satu konsep pariwisata perkotaan di mana pertumbuhan atraksi wisata sebagian besar bergantung pada karya manusia atau kreativitas (Richard dan Wilson dalam Buladja, 2020). Kota Salatiga dapat menjadi kandidat Creative City of Gastronomy UNESCO karena Kota Salatiga tidak hanya memiliki keistimewaan kuliner yang dapat menarik wisatawan, namun juga memiliki catatan atau jejak sejarah yang menarik untuk ditelusuri. Menurut hasil penelitian Buladja (2020) Salatiga diakui sebagai kota kreatif dengan penawaran dan atraksi pariwisata yang unik, termasuk sebagai tempat pertunjukan musik live, pameran seni regional, kerajinan dan seni tradisional, festival kuliner, serta keahlian kuliner. Komponen-komponen ini menjadi landasan utama untuk pertumbuhan pariwisata perkotaan. Sebagai destinasi wisata inovatif, Salatiga memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pengembangan pariwisata.

Wisata gastronomi akhirnya telah menjadi tren baru dalam pengembangan kepariwisataan Kota Salatiga sebagai dampak dari masuknya

Kota Salatiga masuk dalam nominasi Kota Kreatif Gastronomi, yang turut mendorong pertumbuhan sektor UMKM di wilayah tersebut. Berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 mengenai Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026, usaha mikro di kota ini menunjukkan tren positif yang tercermin dari peningkatan omzet selama periode 2017-2021, yakni dari Rp598.650 juta pada tahun 2017 hingga mencapai Rp401.760 juta pada tahun 2021.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun 2012-2027, urusan pariwisata di Kota Salatiga dilaksanakan di tingkat kota dalam kerangka Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kota Salatiga (RIPPARDA). Inisiatif regional meliputi pertumbuhan pariwisata di Kota Salatiga sebagai Kota Gastronomi Kreatif. Melalui inisiatif untuk pengembangan sumber daya pariwisata, ekonomi kreatif, dan pengembangan budaya, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga untuk tahun 2023–2026, yang menjadi bagian dari Prioritas Pembangunan Kota Salatiga untuk tahun 2024, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pelestarian seni dan budaya, termasuk kekayaan gastronomi. Kebijakan lainnya tercantum pada Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) 2021-2026 yang telah menetapkan Destinasi Gastronomi seperti destinasi kuliner sebagai tujuan wisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.



Gambar 1.3 Spot Center Kuliner Kota Salatiga (Kawasan Kuliner Monginsidi)

Sumber: *gastronomy.salatiga.go.id, Shutterstock*

Pengembangan pariwisata Kota Salatiga telah menjadi salah satu isu dan sasaran strategis bagi Pemerintah Kota Salatiga dan kota kreatif gastronomi menjadi tren baru dalam perkembangan pariwisata Kota Salatiga yang kemudian dalam mendukung tujuan tersebut telah melakukan beberapa upaya. Dalam mendukung perkembangan Kota Pariwisata Gastronomi, Pemerintah Kota Salatiga telah menetapkan kawasan pariwisata dengan luas kurang lebih 92,03 hektar, yang termasuk penetapan kawasan pariwisata kuliner di Kelurahan Sidorejo Lor dan Blotongan. Selain Kelurahan Sidorejo Lor dan Blotongan, Pemerintah Kota Salatiga juga menetapkan Kawasan Tematik Kuliner seperti Kawasan Kampung Singkong Ngaglik dan menyediakan fasilitas pada *spot center* kuliner yang tersebar di Kota Salatiga seperti contohnya di Kawasan Kuliner Monginsidi, Pasar Tiban Jalan Lingkar Selatan, Pasar Pagi Salatiga, dan Kawasan Kuliner Raden Patah.



Gambar 1.4 Pelaksanaan *Gastronomy Event* Kota Slatiga

Sumber: *dinkopukm.salatiga.go.id, RRI.co.id, klikdinamika.com*

Kota Salatiga juga telah melaksanakan beberapa program terkait pariwisata gastronomi, seperti contohnya Salatiga Fair, Salatiga Expo, Salatiga Gastronomy Conference International, dan Festival Kuliner Indonesia. Pengembangan Kota Salatiga sebagai Kota Gastronomi, apabila dilaksanakan dengan maksimal akan menambah jumlah wisatawan yang datang ke Kota Salatiga dan akan berdampak pula pada UMKM yang semakin berkembang di Kota Salatiga. Namun, pengembangan pariwisata Kota Salatiga masih memiliki kendala atau masalah utamanya dalam hal partisipasi pelaku usaha dan masyarakat serta kesiapan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam menjadikan Salatiga sebagai Kota Kreatif Gastronomi. Tantangan pengembangan pariwisata Kota Salatiga sebagai Kota Kreatif Gastronomi tercantum dalam RPD Kota Salatiga tahun 2023-2026 dimana kegiatan promosi wisata gastronomi masih kurang dilakukan.

Proses kolaborasi dalam pengembangan pariwisata gastronomi di Kota Salatiga masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, utamanya dalam kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep “Kota Gastronomi” sehingga menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dan aktor lain seperti

pelaku usaha. Masalah tersebut dapat terjadi karena mekanisme koordinasi yang kurang efektif dan kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Kota Salatiga yang dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga. Sejalan dengan penelitian Hendayana (2023) yang berjudul “Kota Salatiga Menuju Kota Gastronomi”, menyatakan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga telah melakukan berbagai upaya untuk mempromosikan wisata gastronomi Salatiga seperti melalui media sosial instagram, Facebook, dan Youtube Disbudpar Kota Salatiga bahkan membuat website gastronomy.salatiga.go.id serta instagram [@gastronomy.salatiga](https://www.instagram.com/gastronomy.salatiga). Namun, usaha tersebut masih dirasa kurang karena masyarakat umum masih banyak yang belum mengetahui adanya pengembangan Kota Salatiga di bidang wisata Kota Gastronomi yang dapat mengurangi partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata gastronomi. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga dinilai masih belum mampu memberikan sosialisasi yang meluas dan menjangkau masyarakat mengenai arti kota gastronomi. Kurangnya partisipasi juga dibuktikan pada RPD Kota Salatiga yang menyatakan masih rendahnya persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Salatiga yang dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan atau deliberasi dapat berpengaruh pada efektif atau tidaknya suatu proses collaborative governance. Sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widyastuti (2025) menunjukkan bahwa karena beberapa kelompok masyarakat

memiliki tingkat literasi digital yang rendah dan akses yang tidak merata terhadap sumber daya digital, partisipasi masyarakat dalam mekanisme pengelolaan sampah di Yogyakarta dan Banyumas masih minim. Akibatnya, diperlukan kebijakan dan inisiatif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Masalah tersebut dikuatkan pendapat yang menyatakan bahwa berbagai kajian mengenai kolaborasi menekankan betapa krusialnya pendekatan partisipatif dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan (S. Page dalam Astuti dkk, 2020). Dalam kerangka tata kelola kolaboratif, kemitraan dengan sektor swasta terbukti mampu memperkuat sumber daya dan mendorong inovasi guna meningkatkan kapasitas kebijakan. Meski demikian, keterlibatan masyarakat tetap menjadi elemen yang tidak kalah penting dalam proses perencanaan maupun penerapan kebijakan (Jagannathan dalam Widyastuti, 2025).



Gambar 1.5 Media Sosial dan Website Kota Gastronomi Salatiga

Sumber : Media sosial dan Website Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga (2025)

Salah satu permasalahan yang muncul dalam pengembangan pariwisata gastronomi di Kota Salatiga adalah masih lemahnya pengembangan UMKM lokal. UMKM di Salatiga menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal inovasi, pemanfaatan teknologi, dan pengelolaan kreativitas sebagai bagian dari kekayaan intelektual. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga melalui situs resmi mereka, gastronomy.salatiga.go.id. Dalam perkembangannya, Kota Kreatif yang didalamnya termasuk Kota Gastronomi tidak hanya mengenalkan pada potensi kota tersebut saja, akan tetapi juga menjadi salah satu usaha untuk meningkatkan peran UMKM sebagai pendorong ekonomi dan sosial kota dalam berdaya saing di tingkat lokal maupun internasional (Michels & Steyaert dalam Anisa Nurul, 2022).

Masalah pada proses kolaborasi juga terlihat pada kurangnya sumber daya manusia dan sumber daya teknologi dalam mewujudkan Kota Salatiga menjadi Kota Kreatif Gastronomi. Aktor yang terlibat dalam kolaborasi pengembangan pariwisata gastronomi Kota Salatiga, seperti pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga dan pelaku usaha dinilai masih belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai konsep Kota Kreatif Gastronomi. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh Hendayana (2023) yang berjudul “Kota Salatiga Menuju Kota Gastronomi”, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga dinilai belum mampu menyediakan fasilitas ruang kawasan kuliner secara maksimal terhadap aktivitas wisata di kawasan ekonomi kreatif serta masih memiliki pengetahuan dan keterampilan yang minim dalam hal spesialisasi kepariwisataan, umumnya di bidang gastronomi, yang mempengaruhi pengembangan Kota Gastronomi.

Pengetahuan yang belum memadai serta sumber daya yang belum memenuhi kapasitas dapat menghambat proses kolaborasi. Masalah tersebut selaras dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh (Paramita, dkk., 2025) bahwa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi hambatan signifikan dalam pengembangan Kampung Warna-Warni Jodipan, dimana walaupun tempat wisata memiliki daya tarik dan jumlah kunjungan wisatawan asing yang relatif tinggi, namun potensi tersebut tidak maksimal.

Masalah tersebut memperkuat pendapat Lusiana & Candradewini (2024) bahwa keberhasilan pelaksanaan *collaborative governance* ditentukan salah satunya dari kapasitas sumber daya yang dimiliki dimana

sumber daya tersebut memiliki pengaruh besar. Oleh karena itu, diperlukan kecukupan dari kemampuan, kompetensi, dan keahlian dari sumber daya yang dimiliki dalam suatu proses kolaborasi.

Tabel 1.2 Jumlah Kunjungan Wisatawan Kota Salatiga 2017-2024

Tahun	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Jiwa)
2017	154.580
2018	304.054
2019	441.860
2020	89.423
2021	183.210
2022	288.234
2023	254.679
2024	305.737

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kurangnya kesiapan Pemerintah Kota Salatiga dalam mewujudkan Kota Salatiga sebagai Kota Gastronomi dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengembangan Kota Gastronomi terlihat dari berkurangnya angka wisatawan yang berkunjung. Jumlah kunjungan

wisatawan di Kota Salatiga menurut data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga jumlah kunjungan wisatawan belum memenuhi target dalam rencana strategis tahun 2017 s.d. 2021. Dalam data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kunjungan wisatawan Kota Salatiga meskipun mengalami peningkatan dan hanya mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, namun kenaikan tersebut dinilai masih dinilai belum sesuai harapan.

Permasalahan yang telah disebutkan di atas tidak terlepas dari adanya masalah pada kolaborasi yang dilakukan oleh *stakeholder* atau pemangku kepentingan yang bertanggung jawab dalam peningkatan pariwisata dan pencapaian komponen Kota Kreatif Gastronomi. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu Ziza Namira (2024) yang berjudul “Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kota Salatiga dalam Mewujudkan Kota Kreatif Gastronomi”, salah satu indikator keberhasilan pengembangan jenis pariwisata, termasuk gastronomi, bergantung pada komitmen dari para pemangku kepentingan. Dalam penelitian tersebut menyatakan hasil Kota Salatiga juga telah memenuhi indikator yang ditetapkan oleh UNESCO Creative Cities Network (UCCN) dengan adanya kerjasama antar pemangku kepentingan dalam mencapai komponen Kota Kreatif Gastronomi tersebut.

Kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam melaksanakan pengembangan Kota Salatiga sebagai Kota Gastronomi kenyataannya sudah terjadi kerja sama antara pihak pemerintah, swasta, akademisi, serta

masyarakat dan telah memiliki perwakilan pelaku dari akademisi, bisnis, pemerintah, komunitas, dan media sebagai aktor pengembangan Kota Gastronomi yang telah disebutkan dalam data borang PMK3I. Dinamika kolaborasi antar aktor merupakan hal penting dalam pembangunan Industri Pariwisata Daerah karena sesuai dengan Arah Kebijakan dan Strategi Perencanaan Pembangunan Industri Pariwisata RIPPARDA Kota Salatiga Pasal 37 ayat (2) dalam melaksanakan arah kebijakan pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata dilaksanakan strategi penguatan kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Proses atau dinamika kolaborasi yang telah terjadi tersebut, kenyataannya masih terdapat tantangan seperti contohnya kolaborasi antara UMKM dan pemerintah di Salatiga telah berjalan, tetapi masih memerlukan peningkatan dan inovasi untuk mengatasi tantangan yang ada dan meningkatkan daya tarik wisata kuliner secara lebih efektif. Tantangan kolaborasi juga telah tercantum dalam Salatiga *City of Gastronomy* melalui website Kota Gastronomi Salatiga, gastronomy.salatiga.go.id, bahwa dalam mewujudkan Kota Salatiga sebagai Kota Gastronomi terdapat tantangan kolaboratif kemitraan hexa helix, yaitu akademisi, komunitas, bisnis, pemerintah, media, lembaga keuangan.

Dalam proses kolaborasi, termasuk kolaborasi dalam pengembangan pariwisata, hambatan bisa terjadi apabila terdapat pemahaman bersama yang tidak tercapai dan komitmen yang lemah. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian oleh Nur, dkk. (2022) dimana efektivitas

kolaborasi sangat berkaitan dengan komitmen dan komitmen yang lemah dari salah satu aktor dapat mengakibatkan pengembangan pariwisata tidak maksimal.

Pernyataan pentingnya komitmen dalam proses kolaborasi tersebut menguatkan pendapat yang menekankan bahwa kolaborasi antar para pemangku kepentingan yang beragam dapat mengarah pada komitmen bersama yang apabila dilakukan secara konsisten akan menimbulkan proses kolaborasi yang lebih harmonis (Emerson dan Gerlak dalam Nur dkk, 2022). Oleh sebab itu, perlu adanya komitmen antar aktor yang terlibat dalam proses dinamika kolaborasi pengembangan pariwisata Kota Kreatif Gastronomi di Kota Salatiga agar tercipta kerja sama yang berkelanjutan dan harmonis.

Berdasarkan permasalahan diatas, Pemerintah Kota Salatiga memerlukan peningkatan kerja sama dan hubungan dengan *stakeholders* atau membutuhkan pengembangan pada upaya *collaborative governance*. Ansell & Gash (2008) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai serangkaian kesepakatan di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kebijakan yang formal, deliberatif, dan berorientasi pada konsensus, dengan tujuan untuk menetapkan atau melaksanakan kebijakan publik atau mengawasi program publik (Astuti dkk., 2020). Sejalan dengan Ansell & Gash, tata kelola kolaboratif merupakan kerangka kerja dan proses untuk mengelola dan merumuskan keputusan kebijakan

publik yang melibatkan aktor-aktor konstruktif dari berbagai tingkatan pemerintahan dan/atau lembaga publik, lembaga swasta, dan masyarakat sipil guna mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja (Balogh dkk. dalam Subarsono, 2011).

Peran aktor-aktor yang terlibat sangat penting dalam pengembangan pariwisata suatu daerah. Dalam mewujudkan Kota Salatiga sebagai Kota Kreatif Gastronomi kolaborasi antar aktor merupakan aspek penting dalam mencapai tujuan publik yaitu optimalnya pengembangan pariwisata gastronomi Kota Salatiga. Menurut (Mathis dalam Pramesti dkk, 2024) mengungkapkan tiga peran aktor dalam pengembangan pariwisata, yaitu sebagai regulator, fasilitator, serta pengelola dan pelaksana. Emerson, Nabatchi, dan Balogh mengemukakan teori *Collaborative Governance* merupakan suatu pendekatan dalam pengelolaan kebijakan publik yang melibatkan berbagai aktor dari pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) proses kolaborasi *Collaborative Governance* terdiri dari: (1) dinamika kolaborasi, (2) tindakan kolaborasi, serta (3) dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi. Proses dinamika kolaborasi menjadi aspek yang sangat krusial karena tingkat keberhasilan pelaksanaan kolaborasi dapat dinilai melalui dinamika yang mencakup tiga komponen utama, yaitu penggerakan prinsip bersama, motivasi kolektif, serta kapasitas untuk bertindak secara bersama.

Permasalahan dalam pengembangan Kota Salatiga sebagai Kota Gastronomi dapat disimpulkan sebagai kegagalan dalam memaksimalkan

prinsip-prinsip teori *collaborative governance* menurut Emerson, utamanya dalam hal kapasitas kolaboratif dan partisipasi lintas aktor. Proses kolaborasi atau kerjasama *stakeholders* untuk mengimplementasikan pelayanan publik dan mewujudkan Kota Salatiga sebagai Kota Gastronomi yang masih dinilai kurang optimal dan masih terdapat tantangan, perlu ditinjau kembali bagaimana dinamika, tindakan dalam praktik kolaborasi, dan kendala-kendala dalam proses kolaborasi agar proses kolaborasi untuk mewujudkan Kota Gastronomi Salatiga dan meningkatkan pariwisata Kota Salatiga dapat meningkat dan terjaga. Permasalahan proses dinamika *collaborative governance* yang telah disebutkan diatas dapat dilihat apa saja kriteria yang memengaruhi ketidakberhasilan proses *collaborative governance* yang telah terjadi diantara aktor yang terlibat dalam pengembangan pariwisata gastronomi di Kota Salatiga. Beberapa faktor yang dapat menjadi kriteria kegagalan atau keberhasilan dalam berjalannya proses implementasi kolaborasi, yaitu dapat disebabkan oleh faktor budaya, faktor institusi, dan faktor politik *Government of Canada* (2008, dalam Astuti dkk, 2020) atau kriteria lain seperti lingkungan, keanggotaan, proses, komunikasi, tujuan, dan sumber daya (Mattesich dan Monsey, dalam Astuti dkk, 2020).

Permasalahan dalam proses *collaborative governance* pengembangan pariwisata Kota Gastronomi di Kota Salatiga diantaranya adalah kurangnya pengetahuan dari sumber daya manusia tentang konsep pariwisata gastronomi atau dalam hal ini terdapat kekurangan pada tenaga

terampil yang disatukan. Menurut penelitian terdahulu oleh Hendayana (2023) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga dan aktor lain yang terlibat masih memiliki pengetahuan dan keterampilan yang minim dalam hal spesialisasi kepariwisataan, umumnya di bidang gastronomi.

Sumber daya merupakan komponen penting dalam pelaksanaan kolaborasi, dimana pernyataan ini sesuai dengan temuan penelitian Ahmad Fitra Baiti Rahman dkk (2023) yang menyatakan dalam menjalankan kolaborasi perlu adanya rasa percaya antara pihak dan sumber daya yang memenuhi agar kolaborasi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Dalam pengembangan pariwisata, kurangnya sumber daya juga dapat menghambat berkembangnya suatu pariwisata seperti temuan penelitian terdahulu oleh Paramita dkk (2025) dimana keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi hambatan signifikan dalam pengembangan Kampung Warna-Warni Jodipan, walaupun tempat wisata memiliki daya tarik dan jumlah kunjungan wisatawan asing yang relatif tinggi, namun potensi tersebut tidak maksimal.

Masalah yang menjadi faktor penghambat kolaborasi lainnya adalah mekanisme koordinasi antar lembaga atau aktor yang tidak berjalan efektif. Menurut penelitian terdahulu oleh Kurnia & Huwae (2024) kurang dikenalnya Kota Salatiga sebagai Kota Gastronomi disebabkan salah satunya dikarenakan kurangnya promosi dan koordinasi yang tidak optimal antara instansi Pemerintah Kota Salatiga dengan *stakeholder* lain seperti dinas terkait, pedagang lokal, komunitas lokal, pihak swasta, dan

masyarakat. Hal tersebut menunjukkan indikasi terdapat masalah pada faktor institusi. Sejalan dengan temuan penelitian Ahmad Fitra Baiti Rahman dkk, (2023) yang menemukan Keterbukaan informasi dalam proses collaborative governance pada pengembangan pariwisata di Kawasan Senggigi menunjukkan bahwa alur koordinasi berjalan dengan baik di tingkat institusi pemerintahan Kabupaten Lombok Barat. Namun, koordinasi dengan para pemangku kepentingan di luar instansi pemerintah masih kurang efektif, sehingga arus informasi yang diterima oleh institusi swasta maupun masyarakat menjadi sangat terbatas.

Dalam kolaborasi yang dilakukan oleh beberapa pihak, penting untuk berbagi informasi agar tidak terjadi kerahasiaan antar pihak tertentu (Fahrudin, Purnama, dan Riasti, dalam Rahman dkk, 2023). Sejalan dengan pernyataan tersebut, kemudian kolaborasi membutuhkan cara kerja horizontal sehingga institusi yang mengadopsi struktur dan akuntabilitas instansi yang vertikal tidak cocok dengan kolaborasi dan dapat menghambat kolaborasi (Government of Canada, dalam Astuti dkk, 2020).

Sejalan dengan permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan, maka diperlukan penelitian yang mampu menganalisis lebih lanjut bagaimana dinamika kolaborasi pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata Kota Salatiga untuk mewujudkan Kota Gastronomi Salatiga dan apa faktor-faktor yang penghambat proses *collaborative governance* yang telah terjadi, oleh karena itu timbul pertanyaan penelitian “**Mengapa dinamika kolaborasi dalam Pengembangan Pariwisata Kota**

Gastronomi di Kota Salatiga belum optimal?'. Kemudian maka penelitian ini berjudul "Dinamika Kolaborasi dalam Pengembangan Pariwisata Kota Kreatif Gastronomi di Kota Salatiga".

1.2 Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Terhambatnya proses dinamika kolaborasi antar aktor yang terlibat dalam upaya pengembangan Pariwisata Gastronomi Kota Salatiga
2. Kurangnya kesiapan Pemerintah Kota Salatiga dalam mewujudkan Kota Salatiga sebagai Kota Gastronomi dan kurangnya pengetahuan masyarakat.
3. Mekanisme koordinasi yang kurang efektif dan kurangnya sosialisasi pariwisata gastronomi dari Pemerintah Kota Salatiga.
4. Komitmen dan kerja sama yang kurang optimal antara berbagai aktor yang menyebabkan rendahnya inovasi UMKM kuliner dan program-program.
5. Kurangnya sumber daya manusia dan sumber daya teknologi dalam pengembangan pariwisata gastronomi di Kota Salatiga.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana dinamika kolaborasi antar aktor dalam pengembangan Pariwisata Gastronomi di Kota Salatiga?
- b. Apa faktor yang menghambat dan mendorong kolaborasi dalam pengembangan Pariwisata Gastronomi di Kota Salatiga?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis dinamika kolaborasi antar aktor dalam pengembangan Pariwisata Gastronomi di Kota Salatiga.
- b. Menganalisis faktor-faktor yang menghambat dan mendorong kolaborasi dalam pengembangan Pariwisata Gastronomi di Kota Salatiga.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam kajian tentang *collaborative governance* dan pengelolaan pariwisata gastronomi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi studi-studi sejenis di masa mendatang, terutama yang berkaitan dengan penerapan model kolaborasi dalam pembangunan sektor pariwisata di daerah.

- b. Manfaat Praktis

1. Memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Salatiga dan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi dalam pengembangan Pariwisata Gastronomi.
2. Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang perlu diatasi untuk mendukung proses pengembangan Pariwisata Gastronomi yang berkelanjutan.
3. Menjadi dasar dalam perumusan strategi atau kebijakan untuk memperkuat sinergi antar aktor, seperti pemerintah, pelaku usaha, komunitas, akademisi, dan media, dalam mewujudkan Kota Salatiga sebagai Kota Gastronomi.

1.5 Kajian Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian ini, yaitu mengenai dinamika proses *collaborative governance*, berbagai kajian yang memiliki keterkaitan dengan topik tersebut dapat dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti/Tahun/Judul	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Temuan Penelitian
1.	(Maulana dkk., 2024.) “Analisis Collaborative Governance di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung”	Mengkaji pelaksanaan proses collaborative governance pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.	Menurut Ansell & Gash (2008) terdapat 5 indikator pelaksanaan <i>collaborative governance</i> yaitu adanya dialog, terbentuknya kepercayaan, adanya komitmen, rasa saling memahami, dan terciptanya hasil sesuai tujuan.	Kualitatif	Sektor pariwisata memerlukan <i>collaborative governance</i> . Cara mengatasi masalah atau kendala proses <i>Collaborative Governance</i> dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas komunikasi antar semua pihak dan kualitas sumber daya manusia.
2.	(Ahmad Fitra Baiti Rahman dkk., 2023) “Collaborative Governance dalam Perkembangan Pariwisata di Kawasan	Menelaah penerapan collaborative governance dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Senggigi, Kabupaten Lombok Barat.	Menurut De Seve (2009), keberhasilan <i>collaborative governance</i> dilihat melalui struktur jaringan, komitmen terhadap tujuan, kepercayaan, akses terhadap kekuasaan, pembagian akuntabilitas, berbagi informasi, dan akses terhadap sumber daya.	Kualitatif	Dalam menjalankan kolaborasi perlu adanya rasa percaya antara pihak dan sumber daya yang memenuhi agar kolaborasi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik.

	Senggigi Kabupaten Lombok Barat”				
3.	(Pramesti dkk., 2025) “Peran Aktor dalam Pengembangan Wisata Kampung Pelangi di Kelurahan Randusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang”	Menganalisis peran para aktor dalam pengembangan wisata Kampung Pelangi serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya di Kota Semarang.	Menurut Riant Nugroho (2014) peran aktor pada proses pembangunan berdasarkan kedudukannya meliputi pembuat kebijakan, koordinator, fasilitator, pelaksana, dan pendukung.	Kualitatif	Terdapat tiga peran aktor dalam pengembangan pariwisata, yaitu sebagai regulator, fasilitator, serta pengelola dan pelaksana.
4.	(Firmansyah & Rahmat, 2023) “Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Tasikmalaya”	Memahami dan menganalisis berbagai aspek dari collaborative governance dalam pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya	Menurut Ansell dan Gash (2007) mendefinisikan tiga tahapan proses kolaborasi yaitu Problem Setting (penentuan permasalahan), Direction Setting (penentuan tujuan), dan Implementasi.	Kualitatif	Dinamika lingkungan sosial dan politik, seperti perubahan kepemimpinan, pergeseran kebijakan, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya partisipasi masyarakat dapat menjadi faktor penghambat utama dalam keberlanjutan kolaborasi..

5.	(Nur dkk., 2022) “Kolaborasi Governansi dalam Program UMKM Juara sebagai Upaya Peningkatan Kompetensi Pelaku Usaha Jawa Barat”	Mengkaji bentuk kolaborasi para pemangku kepentingan dalam mendorong peningkatan kelas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Jawa Barat melalui program UMKM Juara.	<i>Collaborative Governance</i> menurut Emerson dkk (2018) yaitu terdiri dari 3 tahap: dinamika kolaborasi, tindakan dalam kolaborasi, dan dampak dan adaptasi hasil tindakan pada dinamika kolaborasi.	Kualitatif	Efektivitas kolaborasi sangat berkaitan dengan komitmen dan komitmen yang lemah dari salah satu aktor dapat mengakibatkan pengembangan pariwisata tidak maksimal.
6.	(Paramita dkk., 2025) “Kolaborasi Antar Aktor dalam Pengembangan Destinasi Wisata Kampung Warna Warni Jodipan Kota Malang”	Menganalisis pola kerja sama antaraktor dalam pengembangan Kampung Warna-Warni Jodipan dengan menggunakan perspektif Collaborative Governance.	<i>Collaborative Governance</i> menurut DeSeve: struktur jaringan, dampak sementara, komitmen pada tujuan, dan kepercayaan.	Kualitatif	Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi hambatan signifikan dalam pengembangan Kampung Warna-Warni Jodipan, dimana walaupun tempat wisata memiliki daya tarik dan jumlah kunjungan wisatawan asing yang relatif tinggi, namun potensi tersebut tidak maksimal.

7.	(Jumaah dkk., 2022) “Collaborative Governance Berbasis Pendekatan Penta Helix Stakeholder dalam Mengatasi Pandemi Covid-19 di Kabupaten Lombok Timur”	Mengamati upaya penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui perspektif collaborative governance dengan pendekatan pentahelix.	Menurut DeSeve (2009) beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengungkapkan keberhasilan kolaborasi dapat dilihat dari struktur jaringan, dampak sementara, komitmen pada tujuan, dan kepercayaan.	Kualitatif.	Collaborative governance memberi penekanan pada kolaborasi sukarela dan hubungan horizontal. Kesenjangan dalam komunikasi lintas sektor dan belum tercapainya kepercayaan dan kesetaraan dapat menjadi kendala kolaborasi
8.	(Widyastuti, 2025) “Pentingnya Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah: Studi Kasus Mekanisme Pengelolaan Sampah Berbasis Zero Waste	Mengidentifikasi model kolaborasi yang diterapkan di TPS Go-Sari dan TPA BLE Banyumas serta mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatannya.	Teori Collaborative Governance Ansell & Gash yang terdiri dari kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan dan proses kolaboratif	Kualitatif	Tingkat partisipasi masyarakat dalam mekanisme pengelolaan sampah di Yogyakarta dan Banyumas masih rendah yang disebabkan oleh ketimpangan akses digital dan rendahnya tingkat literasi digital di sebagian kelompok masyarakat.

	di TPSGoSaridan TPA BLE Banyumas”				
9.	(Agatha & Pratama, 2025) “Model Hexahelix sebagai Strategi Pengembangan EcoCultural Tourism di Kabupaten Malang: Studi pada Destinasi Wisata Gastronomi Tomboan Ngawonggo”	Mengkaji implementasi model kolaborasi hexahelix dalam pengembangan destinasi wisata gastronomi Tomboan Ngawonggo.	Teori Collaborative Governance Model Hexahelix sebagai model yang signifikan guna mengatasi kompleksitas tantangan di masyarakat melalui pengintegrasian berbagai aktor atau pemangku kepentingan, mulai dari akademisi, pelaku bisnis, pemerintah, komunitas, media, dan konsumen.	Kualitatif	Komunikasi yang efektif dan efisien melalui jalur diskusi sangat dibutuhkan dalam kolaborasi pengembangan pariwisata guna menghindari kesenjangan tujuan yang ingin dicapai secara kolektif. Pemberdayaan sumber daya manusia juga dibutuhkan dalam kolaborasi untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan
10.	(Warul Ulum & Agus Prianto, 2025) “Problematika Wisata Desa Cafe Laut Semare (CLS) dalam Perspektif	Menganalisis penerapan collaborative governance atau kerjasama aktor dalam mengembangkan dan mengelola potensi wisata desa cafe laut semare.	Teori Collaborative Governance Ansell & Gash yang terdiri dari kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan dan proses kolaboratif.	Kualitatif	Kepemimpinan sangat dibutuhkan dalam proses collaborative governance. Apabila terdapat krisis kepemimpinan akan menghambat secara internal

	Collaborative Governance (Studi Kepemimpinan Kharismatik-Tranformasional)”				terhadap kinerja sebuah birokrasi terutama terdapat program unggulan.
11.	(Sadabadi dkk., 2025) “Navigating solar energy transitions in oil-rich countries: A network-based study of collaborative governance in Iran”	Menganalisis tata kelola kolaboratif sebagai pendorong utama dalam transisi ke energi surya (ES) di Iran	Menurut Ansell & Gash (2008) indikator pelaksanaan collaborative governance: adanya dialog, terbentuknya kepercayaan, adanya komitmen, rasa saling memahami, dan terciptanya hasil sesuai tujuan.	<i>Mix-Method</i>	Perbedaan kepentingan antara pemangku kepentingan yang terlibat, koordinasi institusional yang buruk, dan kerangka hukum yang tidak jelas menjadi penghambat kolaborasi negara-negara penghasil minyak dalam upaya transisi ke energi surya
12.	(Ahmad & Esposito, 2025) “Collaborative Governance for Social Change and	Menganalisis bagaimana kepemimpinan dan collaborative governance dapat mendorong perubahan sosial dalam	Teori Ansell & Gash (2008) yang melihat <i>collaborative governance</i> dari 5 aspek: kondisi awal, desain institusional, proses kolaboratif, hasil, dan konteks sistem.	Kualitatif	Rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan dana, dan implementasi kebijakan yang tidak merata dapat menjadi penghambat

	Environmental Sustainability: A Case Study of Campania Region”	pengelolaan limbah di Campania.			proses kolaborasi tata kelola dalam penanganan isu lingkungan.
13.	(Chen dkk., 2025) “Collaborative governance for rural tourism in a centralized state: a tale of two villages in China”	Menganalisis tata kelola kolaboratif untuk pariwisata terhadap pariwisata pedesaan di dua desa Tiongkok, Bajiaoting dan Shangfeng.	Teori proses kolaborasi menurut Ansell & Gash (2008)	<i>Mix method</i>	Tata kelola kolaboratif yang dipimpin oleh entitas komersial di Bajiaoting, yang melibatkan dan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan. Sedangkan tata kelola yang didominasi oleh pemerintah desa Shangfeng membuat warga desa merasa putus asa.
14.	(Muluk dkk., 2025) “Initiating the Thematic Village Concept as an Effort to Improve Sustainable City	Menganalisis dinamika tata kelola kolaboratif dalam pengembangan desa tematik di Malang dengan kerja metodologi sistem lunak (SSM).	Menurut Ansell & Gash (2008) <i>collaborative governance</i> memfasilitasi interaksi berulang di antara peserta melalui proses terstruktur seiring waktu, menciptakan pengaturan institusional dan norma yang secara sengaja dirancang untuk mendorong kolaborasi	<i>Soft systems methodology (SSM)</i>	Kolaborasi dalam pengembangan desa tematik masih memerlukan optimalisasi sumber daya pendanaan dengan melalui skema kemitraan pemerintah-

	Governance in Malang: A Collaborative Governance Regime Approach”				swasta (PPP), dan memanfaatkan crowdfunding serta investasi sosial untuk proyek-proyek spesifik.
15.	(Valentina dkk., 2025) “Collaborative Governance in Handling the Waste Crisis: A Systematic Literature Review “	Menganalisis literatur terkini tentang pendekatan kolaboratif dalam pengelolaan limbah.	Teori Ansell & Gash (2008) yang melihat <i>collaborative governance</i> dari 5 aspek: kondisi awal, desain institusional, proses kolaboratif, hasil, dan konteks sistem	<i>Literature review</i>	Terdapat hambatan dalam pengelolaan limbah dengan pendekatan kolaboratif diantaranya perbedaan tujuan, ketimpangan kekuasaan, dan tingkat keterlibatan yang tidak merata antar pemangku kepentingan.

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Analisis pada lima belas penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *collaborative governance* terutama di bidang pengembangan pariwisata digunakan sebagai bahan pendukung penelitian yang akan dilakukan karena memiliki kesamaan fokus dan teori yang mendukung. Penelitian terdahulu telah mengemukakan berbagai teori *collaborative governance*, seperti teori dari Ansell & Gash, De Save, dan teori lain dari konsep *collaborative governance* seperti model kolaborasi pentahelix. Kemudian metode penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu sebagian besar menggunakan metode penelitian kualitatif dan *mix-method*.

Penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan memiliki beberapa persamaan, diantaranya persamaan pada fokus penelitian, yaitu tentang *collaborative governance*. Perbedaan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian tentang *collaborative governance* di bidang pariwisata masih lebih banyak membahas pariwisata secara umum, sementara pariwisata gastronomi masih jarang diteliti, terutama dalam konteks tata kelola kolaboratif. Pariwisata gastronomi perlu diteliti dalam perspektif *collaborative governance* karena pariwisata gastronomi melibatkan banyak aktor seperti pemerintah, pelaku usaha, komunitas, dan akademisi, sehingga memiliki potensi dinamika kolaborasi yang lebih kompleks. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori *collaborative governance* dari Emerson, Tina Nabatchi, dan Stephen Balogh yang menekankan pada dinamika kolaborasi, seperti proses interaksi antar aktor,

motivasi bersama, dan kapasitas untuk bekerja sama. Pendekatan ini masih jarang digunakan dalam penelitian pariwisata, khususnya di tingkat daerah.

Sektor pariwisata dipandang sebagai salah satu bidang yang memerlukan penerapan proses *collaborative governance*, mengingat cakupannya yang kompleks dan komprehensif, meliputi pengelolaan sumber daya, nilai historis, hingga penyediaan informasi yang akurat (Maulana dkk., 2024). Penelitian ini akan lebih fokus pada proses kolaborasi yang terjadi dilihat dari bagaimana dinamika kolaborasi, tindakan kolaborasi serta dampak pada proses kolaborasi yang telah dilaksanakan namun kurang optimal pada pengembangan pariwisata Gastronomi di Kota Salatiga. Pada penelitian ini juga mengidentifikasi peran berbagai aktor dalam pengembangan pariwisata gastronomi di Kota Salatiga dimana terdapat tiga peran aktor dalam pengembangan pariwisata, yaitu sebagai regulator, fasilitator, serta pengelola dan pelaksana (Pramesti dkk, 2025).

1.5.2 Administrasi Publik

“Administrasi publik” adalah kata majemuk yang berasal dari kata-kata Yunani “administration,” yang berarti “intensif,” dan “ministrare,” yang berarti “melayani.” Menurut Pasolong (2007), administrasi publik adalah bentuk kerja sama di mana sekelompok individu atau lembaga melaksanakan kegiatan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. Caiden (1982) menambahkan bahwa cabang eksekutif dan lembaga pemerintah lainnya bertanggung jawab atas pengambilan keputusan, perencanaan, penetapan tujuan dan sasaran,

mendorong kolaborasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan organisasi masyarakat untuk mendapatkan dukungan dan pendanaan publik untuk program pemerintah, stabilisasi dan perubahan organisasi, mobilisasi dan pengawasan karyawan, kepemimpinan, komunikasi, pengendalian, dan tugas-tugas lainnya.

Hughes (1994) sepakat dengan pandangan ini, menyatakan bahwa administrasi publik adalah kegiatan yang berfokus pada pelayanan masyarakat dan pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh pihak lain. Menurut Chandler dan Plano (1998), administrasi publik adalah tindakan mengintegrasikan dan mengoordinasikan sumber daya dan aparatur publik guna membuat dan mengelola pilihan serta kebijakan publik. Selain itu, Nicholas Henry memandang administrasi publik sebagai sintesis antara teori dan praktik yang menggabungkan proses manajemen dengan upaya untuk mencapai norma-norma sosial.

Berdasarkan teori dan pendapat para ahli di atas, administrasi publik dapat diartikan sebagai Administrasi publik adalah proses kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam rangka mengelola dan melaksanakan kebijakan publik secara efektif dan efisien, melalui pengorganisasian sumber daya dengan menggabungkan unsur manajerial dan nilai-nilai normatif demi mencapai tujuan.

Administrasi publik mempelajari proses kerja sama dimana hal ini sejalan dengan fokus penelitian yang akan menganalisis bagaimana aktor-aktor yang terlibat dalam pengembangan pariwisata gastronomi. Kemudian,

administrasi publik melihat dan memperhitungkan berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi, utamanya faktor eksternal yang memiliki dampak terhadap perkembangan administrasi publik.

Perkembangan suatu disiplin ilmu dapat dikenali melalui pergeseran paradigma yang terjadi di dalamnya. Dalam ilmu administrasi publik, perubahan tersebut tampak dari bergantinya perspektif lama menuju perspektif baru dalam memahami fenomena administrasi. Thomas S. Kuhn menjelaskan bahwa paradigma merupakan seperangkat nilai, metode, prinsip dasar, serta cara pemecahan masalah yang dianut oleh suatu komunitas pada periode tertentu. Dalam konteks administrasi, paradigma berperan penting untuk memahami posisi dan arah perkembangan bidang ini. Mengemukakan bahwa administrasi negara telah mengalami beberapa fase paradigma, yakni Paradigma Dikotomi Administrasi–Politik (1900–1926), Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi (1927–1937), Paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950–1970), Paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956–1970), Paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970–1990), serta Paradigma Governance (1990–sekarang) (Nicholas Henry, dalam Keban, 2014).

Penelitian ini merupakan bagian dari paradigma keenam *governance* dalam administrasi publik karena pada penelitian ini tidak hanya berfokus pada peran pemerintah, namun sesuai dengan paradigma *governance*,

penelitian ini juga menganalisis keterlibatan kemitraan dalam menjalankan fungsi pemerintahan, dimana kemitraan ini melibatkan penduduk lokal, organisasi masyarakat, sektor publik, dan swasta

Robert T. Golembiewski menyatakan bahwa ada dua cara utama untuk melihat cakupan suatu disiplin ilmu: locus dan konsentrasi. Istilah locus merujuk pada bidang atau domain di mana strategi dan taktik digunakan untuk mengatasi masalah (Nicholas Henry, dalam Keban, 2014). Fokus berkaitan dengan metodologi ilmiah, taktik, atau prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Manajemen publik dan kebijakan publik merupakan subjek utama dalam studi administrasi publik, dan studi ini khususnya menyoroti komponen manajemen publik.

1.5.3 Manajemen Publik

Dalam bukunya *The Study of Administration*, Woodrow Wilson menyoroti nilai ilmu administrasi publik dalam mendorong perkembangan budaya bisnis, meningkatkan kualitas aparatur pemerintah, fokus pada faktor-faktor institusional, dan menciptakan teknik tata kelola yang lebih efisien (Keban, 2014). Selain itu, Wilson mengembangkan empat gagasan inti untuk penelitian administrasi publik, yaitu sebagai berikut:

- (1) Pemerintah sebagai *setting* utama organisasi
- (2) Fungsi eksekutif sebagai lembaga utama
- (3) Pencarian prinsip-prinsip dan teknik manajemen yang lebih efektif sebagai kunci pengembangan kompetensi administrasi

(4) Metode perbandingan sebagai suatu metode studi dan pengembangan bidang administrasi publik.

Perhatian manajemen publik dapat dilihat dalam masing-masing paradigma berikut. Misalnya, dalam paradigma pertama, pemerintah diharapkan untuk meningkatkan sistem rekrutmen pegawai, ujian pegawai nasional, klasifikasi jabatan, promosi, disiplin, dan pensiun. Paradigma kedua didasarkan pada prinsip-prinsip universal yang paling umum dikenal sebagai POSDCORB, sebagaimana didefinisikan oleh Luther Gullick dan Lyndall Urwick (1937).

Pada tahun 1990-an, model New Public Management (NPM) dikembangkan, yang menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan manajemen publik di banyak negara. Pada masa ini, (Henry Mintzberg mengembangkan beberapa model, termasuk model meso, model jaringan, model pengendalian kerja, model pengendalian virtual, dan model pengendalian normatif (Henry Mintzberg, dalam Malawat, 2022).

Total Quality Management (TQM), sebuah metode yang telah digunakan selama sepuluh tahun terakhir, menekankan pentingnya kesuksesan manajemen berdasarkan dedikasi para pemimpin dan anggota organisasi, partisipasi anggotanya, serta penerapan pengetahuan. Ada juga metode manajemen publik yang populer di negara-negara berkembang, yang disebut manajemen pembangunan. Pendekatan ini didasarkan pada pandangan Esman (1991) dan Bryan dan White (1982), yang percaya bahwa

tanggung jawab utama pemerintah adalah mengembangkan negara melalui berbagai inisiatif dan program.

1.5.4 Paradigma Manajemen Publik

Paradigma merupakan suatu sudut pandang atau kerangka berpikir yang dijadikan landasan dalam menganalisis suatu permasalahan. Kerangka pemikiran tersebut memberikan arah dan pedoman mengenai bagaimana suatu persoalan dipahami serta cara yang tepat untuk menyelesaikannya. Selanjutnya, dalam perkembangannya, Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt (2013) mengelompokkan perkembangan ilmu administrasi publik ke dalam beberapa paradigma sebagai berikut:

a. Paradigma Old Public Administration (OPA)

Paradigma *Old Public Administration* dikenal sebagai paradigma administrasi publik klasik. Paradigma ini berlangsung mulai tahun 1887 sampai tahun 1987 yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran Woodrow Wilson. Melalui karyanya yang berjudul *The Study of Administration* terkandung konsep pemikiran tentang administrasi publik, yaitu:

- a. Kebutuhan untuk membedakan antara kegiatan pembentukan kebijakan dalam proses politik dan implementasi oleh birokrasi pemerintah. Pemisahan ini sangat penting karena penggabungan administrasi dan politik akan menyebabkan ketidakberesan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme..

- b. Idealisme yang harus dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah meliputi efisiensi dan rasionalitas, yang didasarkan pada pengambilan keputusan birokrasi yang logis.
- c. Untuk menerapkan nilai-nilai tersebut, struktur organisasi yang hierarkis dan efisien harus dibentuk.

a. Paradigma New Public Management (NPM)

Paradigma New Public Management (NPM) berkembang sejak awal dekade 1990-an hingga sekitar tahun 2000-an sebagai respons terhadap berbagai kelemahan birokrasi konvensional dalam paradigma Old Public Administration (OPA). NPM menekankan penerapan praktik manajemen profesional di sektor publik, penggunaan indikator kinerja, serta orientasi yang lebih kuat pada pengendalian berbasis output. Selain itu, paradigma ini mendorong desentralisasi ke unit-unit yang lebih kecil, peningkatan persaingan, adopsi gaya manajerial sektor swasta dalam pengelolaan publik, serta penerapan disiplin dan efisiensi yang lebih ketat dalam pemanfaatan sumber daya.

a. Paradigma New Public Service (NPS)

Paradigma terakhir yaitu *New Public Service*, merupakan paradigma baru yang lahir karena kegagalan paradigma NPM dalam mewujudkan administrasi publik yang berkeadilan sehingga lahirlah paradigma NPS yang lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat (Syafri, dalam Nuraini dan Sawir, 2022)

Dalam perkembangannya, G. Shabbir Cheema mengemukakan empat fase administrasi publik yang juga merupakan perkembangan paradigma administrasi publik, yaitu:

- 1) *Traditional public administration* yang berorientasi pada struktur hierarkis, keberlanjutan, netralitas, penerapan standar yang baku, prinsip legal-rasional, kewenangan formal, serta profesionalisme aparatur.
- 2) *Public Management* yang menekankan penerapan prinsip-prinsip manajerial, seperti efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya, efektivitas kinerja, orientasi pada pengguna layanan, pendekatan berbasis mekanisme pasar, serta perhatian terhadap kepentingan publik.
- 3) *New Public Management* yang menitikberatkan pada nilai fleksibilitas, pemberian kewenangan, inovasi, serta orientasi pada pencapaian hasil, disertai penerapan praktik outsourcing dan contracting out, penguatan etika profesional dan manajerial, serta penggunaan sistem penganggaran berbasis kinerja.
- 4) *Governance*. Paradigma ini menekankan pada mekanisme serta proses yang memungkinkan masyarakat dan berbagai kelompok kepentingan untuk menyampaikan aspirasi, menjembatani perbedaan, serta melaksanakan hak dan kewajibannya. Dalam kerangka ini, tiga aktor utama, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, berinteraksi secara intens untuk mendorong pembangunan yang berorientasi pada manusia (*people-centered development*).

Penelitian ini merupakan bagian dari *governance* dalam administrasi karena menganalisis dinamika dan peran-peran ketiga aktor, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat yang mencerminkan prinsip *governance*. Pada penelitian ini akan membahas kolaborasi antar aktor dalam hexa helix (pemerintah, masyarakat, bisnis, akademisi, komunitas, dan media) yang merupakan ciri utama pendekatan *governance*.

1.5.5 *Governance*

Penerapan kekuasaan atau wewenang oleh pemimpin politik untuk kepentingan warga negara dikenal sebagai paradigma tata kelola. Ini adalah proses yang kompleks di mana berbagai sektor masyarakat memegang kekuasaan dan melaksanakan serta mendistribusikan kebijakan publik yang memiliki dampak langsung terhadap perkembangan sosial dan ekonomi (Tamayao, 2014).

Governance menekankan nilai partisipasi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan implementasi, yang semakin rumit akibat kesulitan dan masalah yang dihadapi (Dwiyanto, dalam Astuti dkk., 2020). Selain itu, menurut Roderick Arthur William Rhodes, tata kelola merujuk pada perubahan dalam cara pemerintahan dijalankan yang memiliki definisi yang lebih luas, seperti cara baru dalam mengelola, kumpulan norma yang diubah, atau cara baru dalam mengendalikan masyarakat.

Governance dapat didefinisikan sebagai jenis transisi dalam implementasi kebijakan publik yang melibatkan tidak hanya pemerintah tetapi juga aktor lain seperti masyarakat, sektor swasta, dan sebagainya. Rhodes (1996) juga menjelaskan beberapa karakteristik dominan dari tata kelola, termasuk fakta *governance*

memiliki makna yang lebih luas daripada pemerintah karena peran aktor non-negara, yang menciptakan ketergantungan timbal balik antara organisasi dan interaksi jangka panjang antara anggota yang didorong oleh kebutuhan untuk bertukar sumber daya dan menegosiasikan pengaturan pembagian.

Tiga isu utama yang membedakan studi tata kelola dari administrasi publik tradisional adalah sebagai berikut: (1) dimensi institusional, yang didefinisikan sebagai sistem administratif yang melibatkan berbagai aktor dari dalam dan luar pemerintah (Dwiyanto, 2003); (2) dimensi nilai, yang dipandang sebagai seperangkat nilai atau prinsip perilaku yang telah tertanam dalam pikiran atau tindakan individu atau kelompok masyarakat tertentu; dan (3) dimensi proses, yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana elemen dan institusi yang berbeda bereaksi terhadap isu-isu publik yang muncul di lingkungan mereka (Dwiyanto, 2018).

1.5.6 Collaborative Governance

Pengelolaan jaringan sosial atau saluran komunikasi antara pemangku kepentingan merupakan landasan kolaborasi. Menurut Ansell dan Gash (2008), *Collaborative Governance* adalah bentuk tata kelola yang secara langsung melibatkan pemangku kepentingan yang tidak termasuk dalam negara atau pemerintah, dan berfokus pada pencapaian konsensus serta partisipasi dalam diskusi selama proses pengambilan keputusan kelompok guna mengembangkan atau melaksanakan kebijakan dan inisiatif publik.

Menurut pandangan yang telah disebutkan, *Collaborative Governance* juga didefinisikan oleh Robertson dan Choi sebagai proses yang egaliter dan kolektif di mana semua pemangku kepentingan memiliki kesempatan yang sama untuk

mengemukakan tujuan mereka dan setiap peserta memiliki wewenang pengambilan keputusan (Robertson dan Choi, dalam Astuti dkk., 2020). Selain itu, menurut Bovaird, kolaborasi antara sektor publik dan swasta didasarkan pada komitmen bersama dan melampaui kesepakatan sederhana untuk kerja sama. Terdapat berbagai jenis kemitraan antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah, termasuk: (1) kerja sama antara lembaga internal atau pemerintah, (2) kerja sama antara lembaga bisnis, dan (3) kerja sama antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.

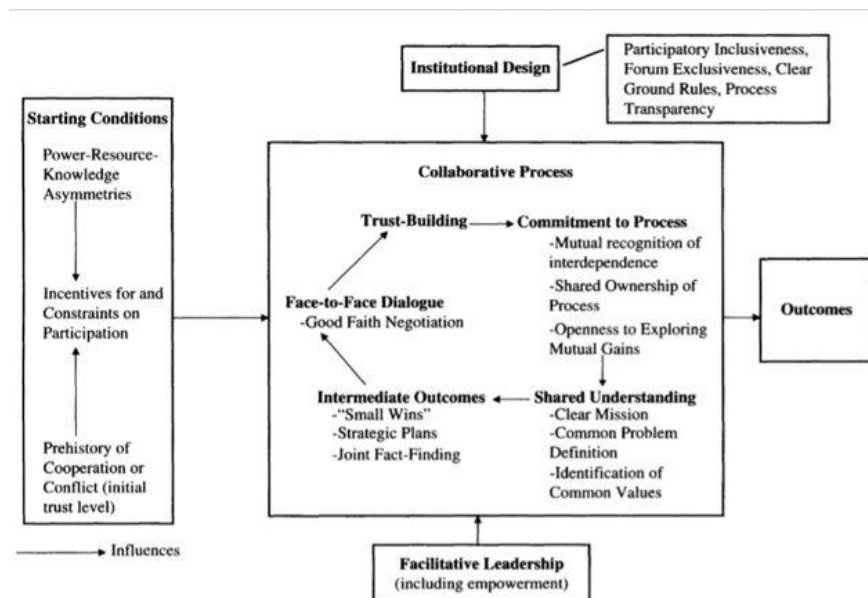
H. Brinton Milward dan Keith G. Provan mengklasifikasikan model *Collaborative Governance* menjadi tiga kategori: (1) tata kelola administratif jaringan, (2) tata kelola kepemimpinan, dan (3) model tata kelola mandiri. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan akan partisipasi berbagai pihak untuk menyelesaikan masalah publik yang semakin kompleks mendorong munculnya model tata kelola kolaboratif. Upaya untuk memaksimalkan pengelolaan publik melalui partisipasi lintas aktor dalam lingkungan tata kelola dikenal sebagai tata kelola kolaboratif.

Bentuk *governance* secara umum terdiri atas model dominasi negara, model pemerintahan, dan model multi-aktor. Model prinsip *collaborative governance* yang dapat menjadi referensi dalam penelitian diantaranya, yaitu:

1) Model *Collaborative Governance* menurut Ansell & Gash

Menurut Ansell & Gash (2008), model *collaborative governance* digambarkan atau memiliki empat variable; yaitu:

- (1) Kondisi awal, yakni situasi dasar yang telah ada sebelum proses kolaborasi berlangsung, yang dapat berperan sebagai faktor pendukung maupun penghambat dalam kerja sama, baik antar pemangku kepentingan maupun antara lembaga atau organisasi dengan para pemangku kepentingan.
- (2) Desain kelembagaan, yaitu pengaturan dasar dalam pelaksanaan kolaborasi yang menekankan pada kejelasan aturan main partisipasi, kejelasan mekanisme atau prosedur pelaksanaan, serta adanya transparansi dalam setiap tahapan proses kolaboratif.
- (3) Kepemimpinan yang dibutuhkan dalam kolaborasi untuk menjadi mediator dalam kolaborasi. Kepemimpinan yang kuat sangat dibutuhkan dalam sebuah kolaborasi karena akan memudahkan keberhasilan suatu kolaborasi.
- (4) Proses kolaboratif yang dilakukan melalui proses: (1) dialog tatap muka, (2) membangun kepercayaan, (3) komitmen dalam proses kolaborasi, (4) pemahaman bersama, (5) Hasil antara (pertengahan)



Gambar 1.6 Collaborative Governance Model Ansell & Gash

2) Model Collaborative Governance menurut Schottle, Haghsheno, dan Gehbauer

(Schottle dkk, dalam Astuti dkk., 2020) melakukan perbandingan terhadap faktor-faktor yang memengaruhi aktivitas yang bersifat otonom, kerja sama, maupun kolaboratif. Dalam model collaborative governance yang dikemukakan oleh Schottle, Haghsheno, dan Gehbauer, dijelaskan bahwa terdapat sejumlah faktor dominan yang paling berpengaruh dalam kolaborasi, yaitu: (1) kemauan untuk berkompromi, (2) komunikasi, (3) komitmen, (4) kepercayaan timbal balik, (5) pertukaran informasi, (6) berbagi pengetahuan, dan (7) kesiapan bersama dalam menanggung risiko. Selain itu, terdapat pula faktor-faktor yang dinilai lebih lemah pengaruhnya, yaitu: (1) potensi terjadinya konflik, (2) koordinasi, (3) pengendalian, (4) kemitraan, dan (5) independensi.



Gambar 1.7 Collaborative Governance Model Schottle, Haghsheno, dan Gehbauer (2014)

3) Model *Collaborative Governance* menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh

Model *Collaborative Governance* menurut Kirk Emerson, Tina Nabatchi, dan Stephen Balogh menjelaskan bahwa proses kolaborasi terdiri dari (Astuti dkk., 2020, hlm 81-86):

a. Dinamika Kolaborasi

Dalam proses kolaborasi, dinamika kolaborasi adalah bagian yang paling penting. Pengungkapan seberapa baik pelaksanaan kolaborasi terdapat pada tiga komponen, yaitu:

(1) Penggerakan Prinsip Bersama

Berbagai upaya seperti dialog secara langsung maupun melalui media teknologi dapat menjadi sarana untuk membangun dan menguatkan prinsip bersama. Proses ini mencakup penegasan kembali tujuan kolektif serta perumusan dan pengembangan

nilai-nilai bersama yang disampaikan dari beragam sudut pandang para aktor. Dalam upaya membangun prinsip bersama tersebut, terdapat beberapa unsur penting, yakni deliberasi, pengungkapan, dan penetapan keputusan (determinasi).

(2) Motivasi Bersama

Motivasi bersama merupakan proses penguatan yang berlangsung secara berulang dan melibatkan beberapa elemen penting, seperti kepercayaan kolektif, kesamaan pemaknaan, legitimasi internal, serta komitmen. Dalam konteks ini, motivasi tersebut terbentuk melalui komponen utama berupa tumbuhnya rasa saling percaya, adanya pemahaman yang selaras, serta pengakuan atau legitimasi yang berkembang dari dalam kelompok itu sendiri.

(3) Kapasitas Melakukan Tindakan Bersama

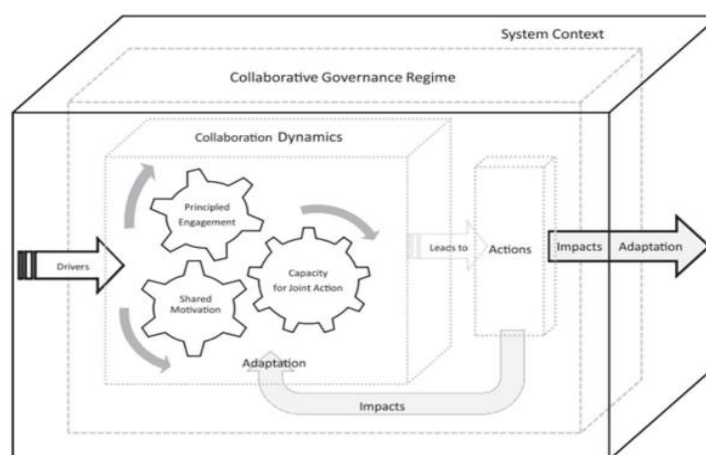
Kapasitas untuk melakukan tindakan bersama merupakan keluaran dari integrasi berbagai elemen lintas fungsi yang memungkinkan terwujudnya aksi yang efektif. Hal ini terjadi karena para aktor memiliki kapasitas yang memadai, yang didukung oleh beberapa komponen utama, yaitu prosedur dan kesepakatan bersama, kepemimpinan, pengetahuan, serta ketersediaan sumber daya.

b. Tindakan Kolaborasi

Berbagai bentuk tindakan dalam kolaborasi pada praktiknya menunjukkan keragaman dan menjadi cerminan dari dinamika yang berlangsung di dalamnya. Hasil dari tindakan tersebut secara langsung menimbulkan dampak sementara yang kemudian memengaruhi kembali proses dinamika kolaborasi, sekaligus menghasilkan implikasi dalam jangka panjang.

c. Dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi

Makna dampak dalam konteks ini merujuk pada efek sementara yang muncul selama berlangsungnya proses kolaborasi. Dampak tersebut kemudian memunculkan umpan balik yang selanjutnya direspons dan disesuaikan dalam mekanisme kolaborasi. Proses adaptasi yang efektif adalah adaptasi yang dilakukan secara kolektif oleh seluruh aktor yang terlibat, tanpa adanya dominasi kepentingan organisasi tertentu di atas kepentingan bersama dalam kolaborasi.



Gambar 1.8 Kerangka Kerja Integratif untuk *Collaborative Governance* Model Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012)

Pada penelitian ini, akan menggunakan model *Collaborative Governance* menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika proses kolaborasi antar aktor dalam pengembangan pariwisata gastronomi. Dalam pengembangan pariwisata gastronomi di Kota Salatiga sudah terdapat aktor-aktor yang terlibat namun belum terjadi kolaborasi yang optimal, sehingga penelitian ini akan mengurai penyebab ketidakefektifan kolaborasi secara rinci, bukan hanya menyebut siapa saja aktornya, tetapi bagaimana hubungan mereka bekerja sehingga sejalan dengan model *Collaborative Governance* menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh sebagai alat untuk mengidentifikasi faktor penghambat kolaborasi.

1.5.7 Dinamika Kolaborasi

Beberapa ilmuwan mengemukakan bahwa proses kolaborasi merupakan tahapan linear yang terjadi dari waktu ke waktu yang dimulai dari pendefinisian masalah sampai kepada pelaksanaan (Yendi dan Meiwanda, 2020, hlm. 3-4). Emerson, Nabatchi, dan Balogh melihat proses dinamika kolaborasi berfokus pada tiga elemen interaksi dinamika kolaborasi, yaitu:

1) Penggerakan Prinsip Bersama (*Principled Engagement*)

Beberapa aspek seperti dialog tatap muka, atau melalui perantara teknologi merupakan cara untuk menggerakan prinsip bersama. Hal ini sejalan dengan pernyataan Yasintha (2020) dimana proses komunikasi tatap muka penting dalam proses kolaborasi untuk membangun kepercayaan dan komitmen. Terdapat penegasan kembali tujuan bersama, pembentukan, dan pengembangan

prinsip-prinsip bersama yang sering diungkapkan melalui berbagai perspektif aktor. Penyatuan prinsip merupakan inti dari penegasan tersebut.

Penggerakan prinsip bersama memiliki komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Pengungkapan merupakan proses penyampaian kepentingan dan nilai-nilai yang dimiliki oleh para aktor, sekaligus upaya membangun kepentingan bersama. Aspek ini dapat dianalisis melalui alasan-alasan yang melatarbelakangi para aktor terlibat dan bergabung dalam proses kolaborasi.
- b. Deliberasi dalam kolaborasi yang terbangun melalui adanya diskusi bersama, keterbukaan dalam menyampaikan pendapat, keberanian mengemukakan ketidaksetujuan, serta penggunaan diskresi, sehingga menghasilkan kualitas proses deliberatif yang baik.
- c. Determinasi merupakan rangkaian tindakan bersama dalam menetapkan tujuan kolaborasi. Determinasi terbagi menjadi dua bentuk, yaitu determinasi primer yang berfokus pada pengambilan keputusan yang bersifat prosedural, serta determinasi substantif yang menitikberatkan pada perumusan kesepakatan bersama dan rekomendasi akhir terkait arah tindakan kolaboratif selanjutnya.

2) Motivasi Bersama (*Shared Motivation*)

Motivasi bersama adalah penguatan siklus yang terdiri dari elemen atau komponen sebagai berikut:

- a. Kepercayaan bersama. Dalam dinamika kolaborasi, dibutuhkan upaya yang berkelanjutan melalui interaksi antarpihak untuk saling mengenal serta

menunjukkan kredibilitas agar dapat dipercaya. Hal ini sejalan dengan temuan Jumaah dkk. (2022) yang menunjukkan bahwa kesenjangan komunikasi lintas sektor serta belum terbangunnya kepercayaan dan kesetaraan berpotensi menjadi hambatan dalam proses kolaborasi.

- b. Pemahaman bersama yang diartikan sebagai saat sesama aktor saling mengerti dan menghargai perbedaan. Pembentukan pemahaman bersama sering dipengaruhi oleh kepercayaan yang telah terbentuk di dalam kolaborasi.
- c. Legitimasi internal merupakan bentuk pengakuan yang tumbuh dari dalam lingkup kolaborasi, di mana para aktor yang terlibat dipandang memiliki kredibilitas serta dapat dipercaya dalam melaksanakan tugas dan perannya.

3) Kapasitas Melakukan Tindakan Bersama (*Capacity for Join Action*)

Elemen ini dimaknai sebagai hasil integrasi berbagai unsur lintas fungsi yang memungkinkan terwujudnya tindakan yang efektif, karena didukung oleh kapasitas aktor yang memadai. Adapun komponen dalam kapasitas untuk melakukan tindakan bersama meliputi:

- a. Prosedur dan kesepakatan bersama mencakup ketentuan umum, protokol pelaksanaan kegiatan, serta mekanisme pengambilan keputusan yang dapat dibentuk melalui kesepakatan, baik yang bersifat formal maupun informal.
- b. Pemimpin kolaboratif memiliki kualitas kepemimpinan karena mereka memainkan berbagai peran penting dalam proses kolaborasi, termasuk (1) mencari dukungan untuk kolaborasi, (2) menginisiasi pertemuan, (3) sebagai fasilitator dan mediator, dan (4) mewakili para pemangku

kepentingan dan kolaborasi secara keseluruhan. Berdasarkan hasil temuan penelitian Warul Ulum & Agus Prianto (2025) kepemimpinan sangat dibutuhkan dalam proses *collaborative governance* karena apabila terdapat krisis kepemimpinan akan menghambat secara internal terhadap kinerja sebuah birokrasi terutama terdapat program unggulan.

- c. Pengetahuan merupakan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh aktor untuk dapat terlibat secara efektif dalam proses kolaborasi. Pengetahuan tersebut mencakup informasi yang telah dipahami oleh para aktor dan akan memberikan manfaat apabila disalurkan serta dibagikan secara tepat.
- d. Sumber daya meliputi: (1) pendanaan keuangan; (2) alokasi waktu dan peran; (3) dukungan administratif dan teknis untuk pelaksanaan kegiatan; (4) bantuan timbal balik; (5) kebutuhan akan keahlian analisis kolaboratif; (6) pelaksana lapangan; dan (7) kebutuhan akan ahli.

1.5.8 Faktor Penghambat dan Pendorong *Collaborative Governance*

Collaborative governance memiliki sejumlah kriteria yang dapat dijadikan standar penilaian dalam mengukur tingkat keberhasilan maupun kegagalannya. Pemahaman yang mendalam terhadap kriteria tersebut sangat diperlukan guna mengevaluasi apakah penerapan *collaborative governance* telah berjalan secara efektif atau justru mengalami hambatan. Dalam praktiknya, terdapat berbagai faktor penghambat yang turut mempengaruhi kelancaran proses kolaborasi selama tahap implementasi berlangsung.

Government of Canada (2008) terhambatnya kolaborasi maupun partisipasi adalah disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

(1) Faktor Budaya

Kolaborasi dapat mengalami kegagalan karena adanya alasan kecenderungan budaya ketergantungan pada prosedur dan tidak berani risiko. Para pelayan publik dan pemimpin yang tidak berani mengambil resiko utamanya dalam pelayanan publik akan membuat suatu kolaborasi tidak dapat menjadi kenyataan atau terhambat.

Ketergantungan pada suatu prosedur secara berlebihan akan dapat menghambat kolaborasi dan tidak akan terjadi kemajuan pada kualitas kolaborasi. Kolaborasi dapat mengalami kegagalan karena ketergantungan pada prosedur dan tidak berani mengambil resiko, serta adanya konsep *top-down* dimana pihak pemerintah mendominasi dan tidak menjalankan kesepakatan berdasarkan kerja sama. Efektivitas kolaborasi bisa berkurang bahkan mengalami kegagalan apabila ada satu kelompok yang mendominasi dan adanya kooptasi strategi pecah belah yang mementingkan kepentingan kelompok yang pro pemerintah dan mengabaikan yang tidak pro pemerintah. Pernyataan ini sesuai dengan temuan penelitian Valentina et a (2025) dimana perbedaan tujuan, ketimpangan kekuasaan, dan tingkat keterlibatan yang tidak merata antar pemangku kepentingan dapat menjadi penghambat pencapaian tujuan dengan pendekatan kolaborasi.

(2) Faktor Institusi

Kolaborasi dapat terjadi ketika terdapat kecenderungan dari institusi-institusi yang terlibat dalam kerja sama, khususnya pihak pemerintah, yang masih menerapkan pola hierarkis terhadap institusi lainnya. Lembaga yang tetap

berpegang kuat pada struktur vertikal, dengan sistem akuntabilitas dan kebijakan yang juga bersifat vertikal, pada dasarnya kurang tepat untuk menjalankan kolaborasi. Hal ini karena kolaborasi menuntut pola kerja dan pengorganisasian yang horizontal, baik di antara instansi pemerintah maupun antara pemerintah dan nonpemerintah. Pemerintahan yang menganut sistem demokrasi pun belum tentu sepenuhnya kompatibel dengan praktik kolaborasi, sebab demokrasi mengandaikan hubungan kemitraan yang horizontal. Selain itu, akuntabilitas pada institusi publik (organisasi milik pemerintah) umumnya bersifat kaku, sehingga dalam konteks ini akuntabilitas lebih berorientasi pada aspek responsibilitas.

(3) Faktor Politik

Apabila para pemimpin tidak kreatif dalam mencapai tujuan politik yang rumit dan bertentangan, kolaborasi mungkin gagal. Kepemimpinan inovatif adalah kemampuan untuk menerapkan nilai-nilai yang berbeda dan menghasilkan hasil yang menguntungkan. Jika pemimpin kurang kreatif dalam mencapai tujuan politik dan cenderung konfrontatif, kolaborasi mungkin terhalang. Perubahan dalam perjanjian dan kepentingan pemangku kepentingan yang bertentangan adalah masalah lain yang dapat menyebabkan kolaborasi gagal. Perubahan pada perjanjian yang dibuat pada awal perjanjian kerja sama dan munculnya kepentingan baru dan bertentangan di antara pemangku kepentingan, termasuk pemimpin kelompok, dapat menyebabkan kolaborasi gagal. Di samping faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, kriteria keberhasilan sebuah kolaborasi

juga dapat dilihat dari 19 faktor yang kemudian dikelompokkan menjadi enam kelompok menurut (Mattessich dan Monsey, dalam Astuti dkk, 2020), yaitu:

(1) Lingkungan

- a. Sejarah Adanya Kolaborasi (*History of Collaboration Exist*)
- b. Pemimpin Kolaboratif (*Collaborative leader*)
- c. Iklim Politik/ Sosial (*Political/ Social Climate*)

(2) Keanggotaan

- a. Saling Menghormati, Memahami, dan Kepercayaan (*Mutual Respect, Understanding, and Trust*)
- b. Hanya Anggota yang Sesuai (*Appropriate Cross-Section of Members*)
- c. Kepentingan Pribadi (*Self-Interest*)
- d. Kemampuan Berkompromi (*Ability to Compromise*)

(3) Proses/Struktur

- a. Kepemilikan bersama (*Member Share Stake*)
- b. Pengambilan Keputusan pada Berbagai Tingkatan (*Multiple Layers of Decision-Making*)
- c. Fleksibilitas (*Flexibility*)
- d. Pengembangan Aturan yang Jelas dan Pedoman Kebijakan (*Development of Clear Roles and Policy Guidelines*)
- e. Kemampuan Beradaptasi (*Adaptability*)

(4) Komunikasi

- a. Terbuka dan Frekuensi Komunikasi (*Open and Frequent*)

- b. Membangun Tautan Komunikasi Formal dan Informal (*Establish Formal and Informal Communication Link*)

(5) Tujuan

- a. Tujuan dan Sasaran yang Nyata dan Dapat Dicapai (*Concrete, Attainable Goals and Objectives*)
- b. Visi Bersama (*Shared Vision*)
- c. Tujuan yang Unik (*Unique Purpose*)

(6) Sumber Daya

- a. Dana yang Cukup (*Sufficient Funds*)
- b. Tenaga Terampil Disatukan (*Skilled Converner*)

Dalam konteks proses dinamika kolaborasi antar aktor dalam pengembangan pariwisata ini, peneliti akan menganalisis bagaimana pelaksanaan kolaborasi dan menganalisis penyebab permasalahan yang terjadi pada dinamika kolaborasi dengan beberapa indikator yang menjadi kriteria apakah proses *collaborative governance* tersebut gagal atau berhasil untuk mencapai tujuan, yaitu terwujudnya pariwisata Kota Gastronomi di Kota Salatiga. Dalam penelitian ini, penulis memilih beberapa faktor penghambat dan pendukung yang relevan dengan masalah penelitian, yaitu faktor institusi, faktor budaya, faktor lingkungan, dan faktor sumber daya.

1.5.9 Pengembangan Pariwisata

Menurut I Gde Pitana dan Michel Picard Desbiolles, pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang sangat strategis karena mampu menimbulkan multiplier effect atau dampak berganda, baik secara langsung maupun tidak

langsung, sehingga memberikan manfaat bagi sektor sosial, budaya, pendidikan, serta perekonomian suatu negara (Murdiastuti, Rohman, & Suji, 2014). Sektor ini dinilai memiliki potensi dan prospek yang besar karena berkontribusi terhadap peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) di suatu wilayah. Lebih lanjut, Sugiharto (2006) menyatakan bahwa pengembangan pariwisata memerlukan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaannya, sehingga kemajuan sektor pariwisata dapat menghasilkan dampak yang bersifat simultan.

Perencanaan dan kebijakan pengembangan pariwisata sangat penting dalam membangun daya tarik wisata. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa empat faktor kunci dalam model konseptual untuk menentukan daya saing adalah faktor sumber daya, perencanaan dan pengembangan, pengelolaan sumber daya inti, dan tujuan kebijakan (Dwyer dan Kim, dalam Murdiastuti, Rohman, & Suji, 2014). Menurut Joseph D. Fritgen (1996), destinasi wisata yang dikembangkan dengan baik dapat mendatangkan pendapatan yang signifikan bagi wilayah sekitarnya. Namun, atraksi wisata yang dibuat secara tidak tepat, dikelola dengan buruk, atau direncanakan dengan buruk dapat merusak lingkungan dan berdampak negatif pada ekonomi dan masyarakat.

Wisatawan supaya dapat menikmati perjalanan mereka sekaligus berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat lokal, pengembangan dan pengelolaan pariwisata harus berpedoman pada prinsip-prinsip manajemen yang mengutamakan kelestarian lingkungan, masyarakat, dan nilai-nilai sosial. (Cox, dalam I Gde Pitana dan I Ketut Surya Diarta, 2009: 30) menyatakan bahwa pedoman berikut perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan pariwisata

- a. Pembangunan dan pengembangan pariwisata harus didasarkan pada kearifan lokal dan *special local sense* yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan.
- b. Menjaga, melindungi, serta meningkatkan kualitas sumber daya yang menjadi fondasi utama dalam pengembangan kawasan pariwisata.
- c. Mengembangkan daya tarik wisata tambahan yang berakar kuat pada kekayaan dan kebudayaan lokal setempat.
- d. Memberikan pelayanan kepada para wisatawan yang berlandaskan pada keunikan budaya serta karakteristik lingkungan lokal.
- e. Memberikan dukungan dan pengakuan terhadap pembangunan serta pengembangan pariwisata apabila terbukti membawa dampak positif bagi masyarakat, namun sebaliknya melakukan pengendalian dan/atau penghentian aktivitas pariwisata tersebut apabila telah melampaui batas daya dukung lingkungan alam maupun tingkat penerimaan sosial masyarakat, meskipun di sisi lain kegiatan tersebut berpotensi meningkatkan pendapatan warga.

Untuk meraih keberhasilan dalam pengembangan pariwisata, diperlukan pemahaman yang mendalam baik dari pihak pemerintah sebagai pengatur maupun dari pihak pengusaha sebagai pelaku bisnis. Pemerintah harus memastikan bahwa pembangunan pariwisata dapat memberikan manfaat sekaligus meminimumkan biaya sosial ekonomi dan dampak lingkungan. Di sisi lain, para pebisnis yang berfokus pada keuntungan tidak dapat bertindak sembarangan untuk mencapai tujuan tersebut, melainkan harus mematuhi kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti peraturan tata ruang, perizinan, lisensi, akreditasi, dan

undang-undang yang berlaku. (Liu, dalam I Gde Pitana dan I Ketut Surya Diarta, 2009 : 218) mengemukakan kerangka implementasi kebijakan pariwisata yang setidaknya menyentuh empat aspek, yaitu:

- a. Penyediaan dan peningkatan sarana infrastruktur;
- b. Kegiatan promosi dan pemasaran;
- c. Upaya peningkatan mutu budaya dan kelestarian lingkungan; serta
- d. Pengembangan dan pemberdayaan kapasitas sumber daya manusia.

1.5.10 Pariwisata Gastronomi

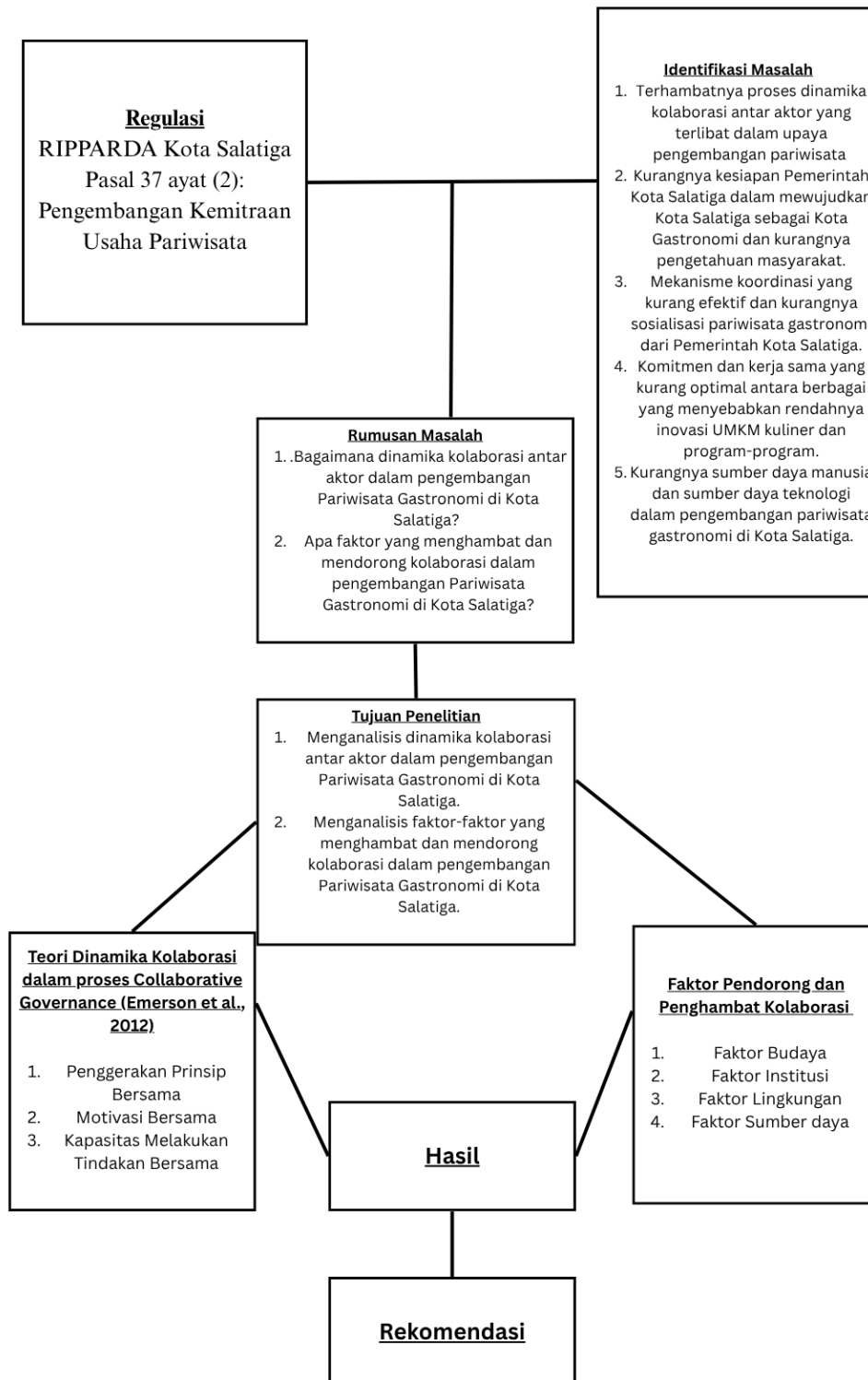
Istilah Yunani “gastros,” yang berarti perut, dan “gnomos,” yang berarti pengetahuan dan hukum, merupakan asal usul kata “gastronomi.” Sebuah negara atau lokasi kuliner adalah tempat yang menyajikan atau menyiapkan makanan (Guzel & Apaydin, 2016). Gastronomi lebih berkaitan dengan pemahaman yang luas tentang makan dan minum, terutama ketika makanan lezat dihargai sebagai bentuk seni yang halus yang menjadi bagian dari gaya hidup yang lebih baik.

Gastronomi, sebagai elemen penting dalam wisata kuliner, kini menjadi sektor yang berkembang pesat dalam industri pariwisata secara keseluruhan. Menurut Hall dan Sharples (2003) wisata gastronomi adalah salah satu yang paling banyak diterima dalam literatur. Wisata kuliner adalah perjalanan yang bertujuan untuk mendapatkan pengalaman di daerah gastronomi, baik untuk rekreasi maupun hiburan, yang mencakup kunjungan ke tempat-tempat wisata utama serta produsen makanan sekunder, festival gastronomi, pameran makanan, acara, pasar petani, pertunjukan dan demonstrasi memasak, mencicipi produk makanan berkualitas, atau kegiatan pariwisata lainnya yang berkaitan dengan makanan.

Dalam wisata gastronomi, makanan menjadi motivasi utama bagi pengunjung untuk pergi ke suatu destinasi, sementara faktor geografis berperan sebagai faktor sekunder. Dengan demikian, makanan mengambil alih peran lokasi geografis sebagai tujuan utama, sedangkan lokasi itu sendiri berfungsi sebagai latar belakang untuk pengalaman kuliner yang otentik. Namun, daya tarik awal yang ditawarkan oleh makanan dan fokus pada makanan saja tidak cukup untuk membentuk identitas suatu destinasi.

Williams dkk. (2014) menjelaskan bahwa sebuah tujuan tidak hanya harus menarik dari segi kuliner, tetapi juga harus mudah diakses dengan infrastruktur dasar yang memadai, organisasi yang baik, keramahan penduduk setempat, dan pemasaran yang tepat sasaran. Sayangnya, beberapa negara dan wilayah yang terlibat dalam kegiatan gastronomi sering kali hanya berkonsentrasi pada aspek makanan, tanpa memperhatikan kecukupan dan efektivitas faktor pendukung yang berhubungan dengan daya tarik wisatawan gastronomi. Oleh karena itu, otoritas lokal memiliki tanggung jawab untuk memastikan adanya infrastruktur yang memadai agar fungsi gastro-wisata dapat berjalan dengan lancar.

1.5.11 Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: Data diolah Penulis (2026)

1.6 Operasionalisasi Konsep

Dinamika kolaborasi dalam pengembangan pariwisata kreatif gastronomi adalah suatu proses kolaborasi yang digunakan untuk mengungkapkan seberapa baik pelaksanaan kolaborasi yang dilakukan oleh aktor-aktor yang terlibat untuk mencapai tujuan bersama, yaitu terwujudnya pariwisata gastronomi yang berkelanjutan. Dinamika kolaborasi merupakan inti dari kerangka kerja *collaborative governance* yang menjelaskan bagaimana proses kolaboratif berkembang dan berfungsi di antara para pemangku kepentingan. Terdapat tiga indikator untuk menganalisis bagaimana dinamika kolaborasi antar aktor dalam pengembangan Pariwisata Gastronomi di Kota Salatiga yang menjadi sub-fenomena dalam penelitian ini sesuai dengan teori dinamika kolaborasi dari Emerson, Nabatchi, dan Balogh yaitu penggerakan prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas melakukan tindakan bersama.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dinamika kolaborasi dalam pengembangan pariwisata gastronomi merupakan suatu kriteria atau tolok ukur yang digunakan dalam menilai apakah suatu proses kolaborasi mengalami keberhasilan atau kegagalan dalam proses implementasinya. Faktor suatu kolaborasi berhasil atau mengalami kegagalan dapat disebabkan oleh faktor budaya, faktor institusi, faktor lingkungan, dan faktor sumber daya.

Tabel 1.4 Operasionalisasi Konsep Dinamika Kolaborasi Pengembangan Pariwisata Kota Kreatif Gastronomi di Kota Salatiga

No	Fenomena	Sub Fenomena	Gejala
1.	Dinamika Kolaborasi antar aktor dalam proses <i>collaborative governance</i> pengembangan pariwisata kota kreatif gastronomi di Kota Salatiga.	<p>Penggerakan Prinsip Bersama merupakan proses yang dilakukan melalui dialog langsung maupun pemanfaatan media teknologi untuk mendorong terciptanya kesepahaman bersama. Dalam proses ini, terjadi penegasan kembali terhadap tujuan kolektif, serta pembentukan dan penguatan prinsip-prinsip bersama yang muncul dari beragam sudut pandang para aktor yang terlibat. Komponen dalam indikator ini yaitu pengungkapan (<i>discovery</i>), deliberasi (<i>deliberation</i>), dan determinasi (<i>determination</i>).</p> <p>Motivasi Bersama (<i>Shared Motivation</i>) adalah proses penguatan siklus yang terdiri dari komponen elemen kepercayaan bersama, pemahaman bersama, legitimasi internal, dan komitmen.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengungkapan (<i>discovery</i>) atau proses mengungkap kepentingan, nilai-nilai actor, Upaya konstruksi kepentingan Bersama, serta analisis mengapa aktor tersebut tergabung dalam kolaborasi. 2. Deliberasi (<i>deliberation</i>) merupakan proses atau upaya menyatukan berbagai kepentingan, tindakan lanjutan, dan evaluasi dalam berbagai upaya kolaborasi. 3. Determinasi (<i>determination</i>) merupakan rangkaian tindakan penetapan bersama akan tujuan berkolaborasi. <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan Bersama (<i>Mutual Trust</i>) merupakan usaha dari interaksi untuk mengetahui (<i>discover</i>) satu sama lain dan membuktikan kelayakan untuk dipercaya dalam melaksanakan kolaborasi atau upaya untuk menilai tingkat kepercayaan antar aktor yang

			<p>terlibat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pemahaman Bersama (<i>Mutual Understanding</i>) dimana sesama aktor saling memahami dan menghargai perbedaan. Pemahaman bersama digunakan untuk mempelajari bagaimana aktivitas kolaborasi berlangsung dan membantu percepatan adaptasi 3. Legitimasi internal (<i>internal legitimation</i>) merupakan adanya pengakuan yang berasal dari internal kolaborasi bahwa aktor-aktor kolaborasi dapat dipercaya dalam menjalankan tugas dan perannya.
		<p>Kapasitas Melakukan Tindakan Bersama maksudnya ialah berbagai hasil dari elemen-elemen lintas fungsional untuk menghasilkan tindakan yang efektif karena ada kapasitas memadai dari aktor-aktor yang terlibat. Empat elemen kapasitas tersebut ialah prosedur dan kesepakatan bersama, kepemimpinan, pengetahuan dan sumber daya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur dan Kesepakatan Bersama (<i>Capacity for Join Action</i>) yang meliputi aturan umum, protocol kegiatan, aturan untuk membuat Keputusan untuk melaksanakan program yang disepakati oleh aktor kolaborasi. 2. Kepemimpinan (Leadership) yang mempunyai peran mutlak dalam proses kolaborasi.

			<p>3. Pengetahuan dan Sumber daya (<i>Knowledge and Resource</i>) merupakan segala informasi yang diperlukan oleh actor dalam proses kolaborasi dan sumber pendanaan, peran, implementor, dukungan teknis, atau pendampingan yang dimiliki pemangku kepentingan.</p>
2.	<p>Faktor Penghambat dan Pendorong <i>Collaborative Governance</i> untuk menilai apakah kolaborasi yang dilakukan berhasil atau mengalami kegagalan.</p>	<p>Faktor Budaya dimana suatu kolaborasi dapat gagal karena ada budaya ketergantungan terhadap prosedur dan tidak berani mengambil resiko serta partisipasi kelompok kepentingan lainnya dianggap tidak penting. Komponen faktor budaya adalah kepentingan dan budaya ketergantungan pada prosedur.</p> <p>Faktor Institusi merupakan kondisi dimana kolaborasi dapat mengalami kegagalan karena institusi-institusi yang terlibat menerapkan struktur hierarkis terhadap institusi lainnya dan tidak adanya responsibilitas serta akuntabilitas dari institusi publik. Elemen faktor institusi ialah</p>	<p>1. Partisipasi kelompok kepentingan atau pemangku kepentingan lain dianggap bukan hal utama dan didominasi oleh kelompok dominan/pemerintah.</p> <p>2. Budaya ketergantungan pada prosedur dan tidak berani mengambil resiko atau terobosan baru dan kolaborasi terlalu bersifat top-down.</p> <p>1. Penerapan struktur hierarkis terhadap institusi yang terlibat dimana kurang relevan dengan proses kolaborasi yang membutuhkan cara kerja horizontal antara pemerintah dan non pemerintah.</p>

	penerapan struktur hierarkis institusi dan akuntabilitas institusi publik.	2. Akuntabilitas Institusi Publik yang cenderung kaku atau hanya mengacu pada aturan yang berlaku saja.
	Faktor Sumber Daya merupakan kondisi dimana suatu kolaborasi dapat berhasil apabila memiliki tenaga terampil yang disatukan (skilled converner) dan dana yang cukup yang diperlukan dalam pengembangan dan keberlangsungan kelompok kolaborasi. Komponen faktor sumber daya adalah dana yang cukup dan kondisi terampil yang disatukan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga terampil yang disatukan 2. Pembiayaan yang memadai
	Faktor Lingkungan dapat menjadi pendorong dimana adanya lingkungan yang mendukung sejarah kerja sama yang baik, pemimpin yang kolaboratif, dan iklim politik kondusif dapat menciptakan suasana sinergi yang positif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Latar belakang kolaborasi 2. Iklim Politik atau Sosial

1.7 Argumen Penelitian

Kota Salatiga memiliki potensi menjadi Kota Kreatif Gastronomi yang dapat meningkatkan pengembangan pariwisata di Kota Salatiga dan menambah jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Salatiga. Pemerintah Kota Salatiga telah

berupaya melakukan pengembangan pariwisata Kota Kreatif Gastronomi dengan melakukan kolaborasi dengan beberapa pihak, seperti pelaku usaha, akademisi, media, dan lembaga lain. Kolaborasi antara Pemerintah Kota Salatiga dan pihak-pihak tersebut merupakan perwujudan *Collaborative Governance*. *Collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2008) merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara dengan tujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik.

Menurut Maulana dkk (2024) sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang dinilai membutuhkan pemanfaatan proses *collaborative governance*. Dalam upaya mewujudkan dan mengembangkan pariwisata gastronomi di Kota Salatiga, masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat pencapaian tujuan mewujudkan Kota Salatiga menjadi Kota Kreatif Gastronomi diantaranya adalah kesiapan Pemerintah Kota Salatiga yang kurang, kurangnya pemahaman antara masyarakat dan pelaku usaha tentang konsep gastronomi, koordinasi yang kurang optimal, dan belum adanya sumber daya manusia dan teknologi yang memadai. Permasalahan tersebut termasuk dalam masalah proses kolaborasi, yaitu pada proses dinamika kolaborasi. Dinamika kolaborasi menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2011) merupakan pengungkapan seberapa baik pelaksanaan kolaborasi.

Dalam penelitian ini akan menganalisis bagaimana proses kolaborasi dan permasalahan-permasalahan dalam kolaborasi antar pemangku kepentingan yang dapat menghambat pencapaian tujuan mewujudkan Kota Salatiga sebagai Kota Gastronomi dan kebijakan publik untuk mengembangkan pariwisata Kota Salatiga.

Penelitian ini akan menganalisis menggunakan teori proses *collaborative governance* menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2011). Kemudian dalam penelitian ini juga akan menganalisis apa saja faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan proses *collaborative governance* dengan tujuan dapat menghasilkan kontribusi untuk memperkuat sinergi antar aktor, seperti pemerintah, pelaku usaha, komunitas, akademisi, dan media, dalam mewujudkan Kota Salatiga sebagai Kota Gastronomi.

1.8 Metode Penelitian

Sugiyono (2024) menyatakan metode penelitian pada hakikatnya merupakan pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan kegunaan dan tujuan yang telah ditetapkan. Setiap penelitian memiliki tujuan dan manfaat tersendiri, misalnya penelitian dapat berfungsi sebagai sarana penemuan, pembuktian, maupun pengembangan ilmu pengetahuan. Berdasarkan tingkat kealamanan latar penelitiannya, metode penelitian dibedakan menjadi tiga macam, yaitu eksperimen, survei, dan naturalistik. Metode eksperimen dan survei termasuk dalam pendekatan kuantitatif, sedangkan metode naturalistik diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif.

Sugiyono (2024) mendefinisikan metode penelitian kuantitatif sebagai metodologi yang didasarkan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk mengkaji populasi atau kelompok tertentu, dengan menggunakan prosedur pengumpulan data menggunakan peralatan penelitian, pengolahan data statistik, dan fokus pada verifikasi hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu, metode penelitian kualitatif adalah prosedur yang digunakan dalam lingkungan

alami yang didasarkan pada filsafat postpositivisme dan memprioritaskan pemahaman yang lebih mendalam tentang makna daripada generalisasi temuan penelitian.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2009) penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dilekatkan oleh sejumlah individu atau kelompok terhadap permasalahan sosial maupun kemanusiaan (Kusumastuti & Mustamil Khoirun, 2019). Karakteristik penelitian kualitatif yang membedakannya dari jenis penelitian lainnya telah diuraikan oleh Lincoln dan Guba di antaranya adalah penelitian kualitatif dilaksanakan dalam latar yang bersifat alamiah, instrumen pengumpulan datanya adalah peneliti itu sendiri atau dengan bantuan pihak lain, sasaran penelitiannya diarahkan pada upaya menemukan teori dari dasar-dasarnya, memiliki kriteria tersendiri dalam menilai keabsahan data, serta menggunakan metode kualitatif berupa pengamatan, wawancara, maupun penelaahan dokumen (Lincoln dan Guba, dalam Moleong, 2022). Orientasi hasil penelitian kualitatif berupa deskripsi yang bersifat tentatif dan situasional. Melalui penelitian kualitatif, akan ditemukan teori-teori dasar baru yang memberikan dampak nyata dalam kehidupan untuk mengatasi permasalahan yang bersifat spesifik dan terfokus.

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipologi penelitian dalam dunia metodologi ilmiah mencakup beberapa kategori utama, yaitu penelitian eksploratif, deskriptif, dan eksplanatori. Penelitian bertipe eksploratif dilaksanakan sebagai upaya untuk mengidentifikasi gagasan

maupun hubungan baru yang terkandung dalam fenomena-fenomena tertentu. Penelitian deskriptif, di sisi lain, diarahkan untuk menghasilkan penggambaran yang bersifat objektif atas suatu fenomena yang dikaji. Sedangkan penelitian eksplanatori memiliki tujuan untuk memverifikasi hubungan antarvariabel yang diteliti, utamanya relasi antara variabel bebas dengan variabel terikatnya.

Rancangan penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dimana penelitian dilakukan langsung ke sumber data yang kemudian data terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, serta tidak menekankan pada angka. Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif juga karena memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi/gambaran secara objektif dari suatu fenomena tertentu dan menyajikan informasi mengenai berbagai keadaan sosial yang akan dianalisis dan diinterpretasi arti data yang dikumpulkan dengan metode deskriptif. Menurut Winarno Surachmad (1972), metode deskriptif dapat menghasilkan berbagai kajian yang bersifat teknik survei, studi kasus, dan studi perbandingan.

Penelitian ini melibatkan banyak stakeholder/aktor pengembangan pariwisata gastronomi di Kota Salatiga yang tidak terbatas pada perilaku, interaksi sosial dan motivasinya, maka penelitian ini lebih tepat menggunakan penelitian kualitatif dalam membangun pernyataan pengetahuan tentang dinamika kolaborasi. Selain itu, rumusan masalah dalam penelitian ini termasuk dalam masalah deskriptif yang akan mengeksplorasi atau memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas, dan mendalam yang dalam hal ini adalah bagaimana dinamika kolaborasi dan faktor-faktor yang menghambatnya.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Menurut Lexy J. Moleong (2005:86), lokasi penelitian adalah tempat peneliti melaksanakan kegiatan penelitian, khususnya untuk menangkap fenomena atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada objek yang dikaji, sehingga dapat diperoleh data penelitian yang akurat.

Lokasi yang dijadikan penelitian ini adalah Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. Kota Salatiga dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pariwisata, khususnya dalam subsektor pariwisata gastronomi. Kota ini telah beberapa kali diusulkan menjadi nominasi UNESCO Creative City of Gastronomy, menunjukkan bahwa Salatiga memiliki daya tarik kuliner lokal yang kuat, dukungan komunitas kreatif, serta perhatian dari pemerintah daerah terhadap pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya.

Secara administratif, Kota Salatiga terdiri dari empat kecamatan yaitu Argomulyo, Tingkir, Sidomukti, dan Sidorejo. Situs atau lokasi utama dari penelitian ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga dan kawasan yang menjadi fokus pengembangan pariwisata Kota Kreatif Gastronomi di Kota Salatiga. Kawasan-kawasan yang menjadi fokus pengembangan kota gastronomi di antaranya Kelurahan Sidorejo Lor, Kelurahan Blotongan, Kampung Singkong Ngaglik, serta berbagai spot center kuliner seperti Kawasan Kuliner Monginsidi dan Pasar Tiban Jalan Lingkar Selatan. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan fokus dalam dokumen-dokumen perencanaan daerah seperti RIPPARDA Kota Salatiga 2021–2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023–2026, yang menekankan pentingnya kolaborasi dalam pengembangan sektor pariwisata gastronomi.

1.8.3 Subjek Penelitian

Suharsimi Arikunto (2010) mendefinisikan subjek penelitian sebagai batasan dalam penelitian yang dapat ditentukan melalui benda, hal, maupun orang sebagai tempat melekatnya variabel penelitian (Ratnaningtyas, dkk, 2023). Subjek penelitian juga kerap disebut sebagai responden, yakni pihak yang memberikan respons atas suatu perlakuan yang diberikan. Dalam lingkup penelitian kualitatif, responden atau subjek penelitian lazim disebut informan, yaitu pihak yang menyampaikan informasi terkait data yang dibutuhkan peneliti dalam pelaksanaan penelitiannya (Idrus, dalam Ratnaningtyas et.al, 2022). Sugiyono (2013) menyebutkan bahwa dalam penelitian kualitatif, teknik penentuan sampel yang lazim diterapkan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu, misalnya individu yang dianggap paling memahami permasalahan yang diteliti atau memiliki otoritas sehingga mempermudah proses eksplorasi objek penelitian. Adapun *snowball sampling* adalah teknik penentuan sumber data yang bermula dari jumlah kecil kemudian berkembang semakin besar, karena sumber data awal dinilai belum mampu memberikan informasi yang memadai sehingga diperlukan pencarian sumber data tambahan.

Dalam penelitian ini, peneliti melibatkan informan-informan yang memiliki kontribusi dan berperan langsung dalam kolaborasi dalam pengembangan pariwisata Kota Kreatif Gastronomi di Kota Salatiga dengan informan utama adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga serta menggunakan teknik *snowball sampling* untuk mendapatkan informan lain. Penggunaan teknik *snowball*

sampling digunakan untuk memperluas teoretis setelah menggunakan *purposive sampling* untuk menganalisis berdasarkan tujuan. Pada penelitian ini kedua teknik yaitu *purposive sampling* dan *snowball sampling* digunakan secara bertahap dan saling melengkapi.

Pada tahap *purposive sampling*, peneliti mempertimbangkan kriteria pemilihan subjek penelitian berdasarkan kriteria subjek yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses kolaborasi pengembangan pariwisata gastronomi di Kota Salatiga, memiliki pengetahuan terhadap proses kolaborasi dan aktor yang terlibat, serta memiliki posisi yang strategis atau pengalaman langsung yang relevan dalam pelaksanaan program. Berdasarkan kriteria teknik *purposive sampling* tersebut, *key informant* atau informan kunci yang dipilih adalah aktor yang berasal dari unsur pemerintah, yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga yang berperan sebagai aktor utama atau sebagai inisiator penyelenggaraan program dan kegiatan kolaborasi Pariwisata Gastronomi di Kota Salatiga serta sebagai koordinator dan pengarah kebijakan pada bidang pariwisata di Kota Salatiga.

Teknik *snowball sampling* kemudian diterapkan sebagai tahap untuk mengembangkan jumlah dan variasi informan berdasarkan rekomendasi dari informan awal atau *key informant*, yakni aktor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga. Pada teknik *snowball sampling* pemilihan subjek penelitian mengikuti alur jejaring kolaborasi yang terbentuk di lapangan berdasarkan program atau kegiatan kolaborasi pariwisata gastronomi Kota Salatiga yang telah berlangsung sebelumnya yang dominan dikoordinasikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga. Tahap *snowball sampling* tidak hanya bertujuan untuk

menambah jumlah informan untuk melakukan triangulasi sumber, namun juga bertujuan untuk mengungkap relasi antar aktor dan distribusi peran apakah sudah sesuai dengan prinsip *collaborative governance*.

Pemilihan informan juga didasarkan pada representasi model hexa helix, yang mencerminkan keterlibatan multi-aktor dalam *collaborative governance*. Unsur-unsur tersebut meliputi aktor yang menjadi Pilar Ekosistem Lembaga Kota Kreatif Kuliner di Salatiga yakni aktor pemerintah, pelaku usaha, komunitas masyarakat, akademisi, media, dan lembaga keuangan. Namun, dalam praktiknya, tidak semua aktor memiliki tingkat keterlibatan yang sama, sehingga penelitian ini secara khusus menekankan pada aktor-aktor yang memiliki peran dominan maupun terdampak langsung dalam dinamika kolaborasi.

Informan yang dipilih untuk dilakukan penelitian tentang Dinamika Kolaborasi dalam Pengembangan Pariwisata Kota Kreatif Gastronomi di Kota Salatiga adalah:

- 1) Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga, karena merupakan informan kunci yang memiliki kewenangan dalam perumusan kebijakan, pengelolaan program, serta koordinasi antar aktor dalam pengembangan pariwisata gastronomi.
- 2) Ketua/Wakil Ketua Komunitas Masyarakat Duta Gastronomi Salatiga (MDGS) sebagai perwakilan aktor dari komunitas yang dipilih karena berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat serta memiliki akses terhadap jejaring kolaborasi lintas sektor. Komunitas Masyarakat Duta Gastronomi Salatiga (MDGS) merupakan komunitas yang memiliki keterlibatan cukup

banyak dalam proses diskusi yang diinisiasi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga serta dalam proses perencanaan dan pelaksanaan event Gastronomi Kota Salatiga.

- 3) Anggota Komunitas Masyarakat Duta Gastronomi Salatiga (MDGS) karena merupakan pelaksana langsung yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program Gastronomi di lapangan dan untuk memperoleh perspektif pelaksana lapangan terkait implementasi program, dinamika internal komunitas, serta hambatan yang dihadapi dalam praktik kolaborasi.
- 4) Akademisi di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, dipilih karena memiliki peran dalam pendampingan dan penguatan kapasitas pelaku usaha, sehingga memberikan perspektif berbasis keilmuan dalam kolaborasi.
- 5) Pelaku Usaha Kecil dan Menengah dan pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah utamanya di lokasi strategis pariwisata gastronomi yang dipilih sebagai aktor implementatif yang secara langsung menjalankan program gastronomi dan merasakan dampak dari kebijakan serta proses kolaborasi yang berlangsung.

Melalui kombinasi *teknik purposive* dan *snowball sampling* ini, penelitian tidak hanya mengidentifikasi aktor yang terlibat, tetapi juga mampu memetakan struktur relasi, pola interaksi, serta dinamika kekuasaan dalam *collaborative governance* pengembangan pariwisata gastronomi di Kota Salatiga.

1.8.4 Jenis dan Sumber Data

Menurut Sugiyono (2024) bila dilihat dari sumber data, pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Data primer merupakan data yang berwujud kata-kata dan tindakan yang bersumber langsung dari para informan, serta peristiwa-peristiwa tertentu yang berkaitan erat dengan fokus penelitian, dan diperoleh secara langsung oleh peneliti selama proses pengumpulan data di lokasi penelitian berlangsung. Data-data primer ini merupakan unit analisis utama yang digunakan dalam kegiatan analisis data dimana data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan berbagai aktor yang terlibat dalam proses kolaborasi pengembangan pariwisata gastronomi di Kota Salatiga. Informan terdiri dari pihak-pihak yang memiliki peran penting dalam skema kolaborasi hexa helix, seperti perwakilan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga, pelaku usaha mikro kuliner lokal, akademisi dari perguruan tinggi yang terlibat dalam pendampingan pengembangan ekonomi kreatif, komunitas masyarakat yang aktif dalam pelestarian budaya kuliner, pengelola media yang terlibat dalam promosi wisata gastronomi, serta lembaga keuangan yang berperan dalam mendukung pendanaan UMKM. Data yang diperoleh dari wawancara ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai pengalaman, pandangan, serta tantangan yang dihadapi oleh masing-masing aktor dalam pelaksanaan kolaborasi, sekaligus menilai sejauh mana dinamika kolaborasi telah

terbangun berdasarkan model yang dikemukakan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh.

- 2) Data sekunder adalah bahan tertulis yang digunakan untuk melengkapi analisis data primer. Data ini pada umumnya berupa dokumen-dokumen kebijakan, laporan kinerja, data statistik yang terkait dengan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata gastronomi di Kota Salatiga. Data sekunder penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan. Dokumen yang digunakan meliputi peraturan daerah, rencana pembangunan daerah, rencana induk pengembangan pariwisata, serta laporan tahunan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari website resmi pemerintah daerah seperti gastronomy.salatiga.go.id, laporan statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS), artikel berita, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang mendukung kajian mengenai collaborative governance dan pengembangan pariwisata gastronomi. Data sekunder ini berfungsi untuk memperkuat analisis, memberikan konteks kebijakan, serta melengkapi gambaran empirik mengenai proses kolaborasi antar aktor dalam pengembangan Kota Salatiga sebagai Kota Kreatif Gastronomi.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2024) mengidentifikasi empat teknik pengumpulan data secara umum: observasi, wawancara, dokumentasi, dan kombinasi/triangulasi. Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data: wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi:

1) Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang yang bertujuan untuk saling bertukar informasi dan gagasan melalui proses tanya jawab, sehingga makna dalam suatu topik tertentu dapat dikonstruksikan secara bersama (Esterberg, dalam Sugiyono, 2024). Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam sebagai teknik utama dalam pengumpulan data primer. Wawancara dilaksanakan secara semi-terstruktur guna memberikan ruang fleksibilitas dalam menggali informasi secara lebih leluasa dari para informan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yakni mereka yang memiliki peran atau pengetahuan secara langsung dalam proses kolaborasi pengembangan pariwisata gastronomi di Kota Salatiga, meliputi unsur pemerintah, pelaku UMKM, akademisi, komunitas, media, serta lembaga keuangan. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengalaman, pandangan, serta berbagai tantangan yang dihadapi oleh masing-masing aktor dalam menjalankan proses kolaborasi tersebut.

2) Observasi

Nasution (1988, dalam Sugiyono, 2024) mengungkapkan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan dimana para ilmuwan hanya dapat bekerja dengan menggunakan data yang diperoleh melalui kenyataan hasil observasi. Observasi dilakukan dengan mengunjungi langsung lokasi-lokasi yang menjadi bagian dari pengembangan pariwisata gastronomi di Kota Salatiga, seperti kawasan kuliner, pusat

UMKM, atau tempat penyelenggaraan kegiatan promosi wisata. Melalui observasi ini, peneliti dapat memperoleh data kontekstual terkait bagaimana aktivitas kolaboratif dijalankan, sejauh mana keterlibatan pelaku usaha dan masyarakat, serta bagaimana kesiapan infrastruktur yang mendukung sektor pariwisata gastronomi. Observasi bersifat non-partisipatif, yaitu peneliti mengamati tanpa terlibat langsung dalam kegiatan yang berlangsung.

3) Dokumentasi Visual

Dokumentasi visual dilakukan dengan cara mengambil foto dan merekam kondisi di lapangan selama proses observasi berlangsung. Foto-foto ini mencakup kawasan kuliner, aktivitas UMKM, dokumen kebijakan dan monitoring program, serta kegiatan yang melibatkan kolaborasi antar pihak. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti visual untuk memperkuat deskripsi kondisi aktual dan menjadi bagian dari data pendukung dalam pelaporan hasil penelitian.

1.8.6 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data didefinisikan sebagai suatu proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, maupun bahan-bahan lainnya, sehingga data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat dikomunikasikan kepada pihak lain (Bogdan dalam Sugiyono, 2013:244).

Sementara itu, Miles dan Huberman (1984) menyatakan bahwa aktivitas analisis data dilaksanakan secara interaktif dan berjalan secara

terus-menerus hingga mencapai titik kejenuhan data. Adapun aktivitas yang terlibat dalam proses analisis data yaitu:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif pada umumnya dilakukan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, atau kombinasi dari ketiganya. Pada tahap awal, peneliti melakukan eksplorasi secara menyeluruh terhadap situasi sosial maupun objek yang menjadi fokus penelitian, di mana segala sesuatu yang diamati dan didengar dicatat serta direkam secara lengkap.

b. Kondensasi Data

Miles dan Huberman dalam buku yang telah direvisi (2014) dalam Sugiyono (2024) mengubah istilah reduksi data menjadi kondensasi data. Kondensasi data merupakan sebuah proses yang mencakup kegiatan memilah, memfokuskan, menyederhanakan, serta membuat abstraksi dari data yang diperoleh melalui catatan lapangan, wawancara, transkrip, berbagai dokumen, maupun catatan lapangan lainnya, sehingga data yang dihasilkan menjadi lebih kuat dan bermakna.

c. Penyajian data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menampilkan atau menyajikan data tersebut. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk diagram alir, infografis, korelasi antara kategori, dan deskripsi yang ringkas. Menurut Miles

dan Huberman (1984), teks naratif adalah format yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif. Para peneliti akan lebih mudah memahami kondisi yang muncul melalui penyajian data, dan mereka dapat merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman baru yang mereka peroleh.

d. Verifikasi Data

Proses mengembangkan kesimpulan atau memverifikasi informasi merupakan langkah ketiga dan terakhir. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan merupakan penemuan baru yang belum pernah dibuat sebelumnya. Hasil-hasil ini dapat berupa ringkasan atau ilustrasi dari hal yang sebelumnya ambigu dan menjadi lebih jelas setelah penelitian, serta teori, hipotesis, atau hubungan kausal atau interaksi. Pertanyaan penelitian yang diajukan di awal penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan dapat berubah seiring perkembangan penyelidikan di lapangan, oleh karena itu kesimpulan dalam jenis penelitian ini tidak selalu memberikan jawaban.

1.8.7 Kualitas Data

Sugiyono (2013:270) menyatakan bahwa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas, transferability, dependability (reliabilitas), dan confirmability (objektivitas).

(1) Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan:

- a. Perpanjangan pengamatan dilakukan dengan cara peneliti kembali terjun ke lapangan untuk melaksanakan pengamatan ulang serta mewawancarai kembali sumber data yang telah ditemui sebelumnya maupun sumber data baru. Melalui proses ini, hubungan antara peneliti dan narasumber akan semakin terjalin erat, lebih terbuka, dan dilandasi rasa saling percaya, sehingga seluruh informasi dapat terungkap tanpa ada yang disembunyikan.
- b. Peningkatan ketekunan bermakna bahwa penelitian dilaksanakan secara lebih teliti dan berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, keakuratan data serta kronologi peristiwa dapat terekam secara pasti dan tersusun secara sistematis.
- c. Verifikasi informasi dari berbagai sumber menggunakan teknik yang berbeda dan pada periode yang berbeda dikenal sebagai triangulasi dalam penilaian kredibilitas. Akibatnya, terdapat tiga kategori triangulasi, yaitu:
 - Triangulasi sumber adalah proses verifikasi informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber untuk menilai kredibilitas data.
 - Triangulasi teknik untuk memverifikasi kredibilitas data dengan membandingkan data dari sumber yang sama menggunakan beberapa metode
 - Triangulasi waktu adalah proses melakukan pengamatan, wawancara, dan metode lain dalam konteks yang berbeda atau pada waktu yang berbeda.

Dalam penelitian ini yang akan digunakan adalah triangulasi sumber dengan menguji kredibilitas berdasarkan informasi dari beberapa sumber

atau informan. Data yang telah dianalisis oleh peneliti akan menghasilkan kesimpulan yang selanjutnya akan dilakukan kesepakatan (*member check*) dengan informan yang menjadi sumber data.

- d. Analisis kasus negatif atau peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan.
- e. Menggunakan bahan referensi dengan adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti.
- f. Mengadakan *member check* untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan pemberi data.

(2) Pengujian *Transferability*

Transferability merupakan bentuk validitas eksternal dalam penelitian kualitatif yang menggambarkan sejauh mana hasil penelitian dapat digeneralisasikan terhadap populasi asal pengambilan sampel. Konsep ini berkaitan dengan seberapa jauh temuan penelitian mampu diterapkan atau dimanfaatkan dalam konteks maupun situasi yang berbeda.

(3) Pengujian *Dependability*

Dependability atau yang dikenal sebagai reliabilitas merujuk pada kemampuan suatu penelitian untuk dapat diulang atau direplikasi oleh peneliti lain dengan proses yang serupa. Dalam konteks penelitian kualitatif, pengujian reliabilitas dilaksanakan melalui audit secara menyeluruh terhadap seluruh rangkaian proses penelitian yang telah dijalankan.

(4) Pengujian *Confirmability*

Pengujian confirmabilitas dilakukan dengan mengaitkan hasil penelitian terhadap proses yang telah dijalankan. Apabila hasil penelitian merupakan cerminan dari proses penelitian yang dilaksanakan, maka penelitian tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi standar confirmabilitas yang dipersyaratkan.